

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016 - 2021



DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB.TANJUNG JABUNG BARAT - PROV.JAMBI

Jalan Prof.Dr.Sri Soedewi Maschun Sofyan, SH Kuala Tungkal 36512
Phone/Fax : (0742) 7351051 Email : disbunnaktanjabbarat@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 ini adalah penjabaran dari *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)* Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021.

Rencana Strategis (**Renstra**) adalah gambaran arah kebijakan **Pembangunan Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat** yang akan menjadi acuan dalam menyusun Program dan Kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan selama periode tahun 2016-2021.

Tersusunnya **Rencana Strategis** ini diharapkan akan terciptanya perencanaan yang baik dan terarah dalam pembangunan Sektor **Perkebunan dan Peternakan** di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga pelaksanaannya dapat terintegrasi dengan sektor dan sub sektor lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, juga diharapkan akan mampu mengantisipasi dan menjawab tantangan **Dinamika Pembangunan** Perkebunan dan Peternakan dimasa mendatang serta mampu memenuhi kebutuhan perkembangan **IPTEK dan Isu Global** yang menjadi komitmen pembangunan nasional.

Kuala Tungkal, 13-01-2017

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Tanjung jabung Barat



Ir. Melan Bangun
Pembina Utama Muda
NIP. 19611215 199303 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

Jln. Prof. Dr. Sri Soedewi Maschun Sofwan, SH – Kuala Tungkal 36512
Phone/Fax : (0742) 7351015 Email : disbunnaktanjabbarat@yahoo.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 38 /disbunak/ 2017**

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2016-2021**

**KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan **akuntabilitas** dan **transparansi** pelaksanaan pemerintahan yang lebih **berdaya guna, berhasil guna, bersih** dan **bertanggung jawab** dipandang perlu adanya **Rencana Strategis** (Renstra) Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2016-2021 untuk menjabarkan **Visi, Misi** dan **Tujuan** serta **Sasaran** Organisasi sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan;
- b. bahwa untuk tujuan dimaksud huruf a diatas, dianggap perlu **Rencana Strategis (Renstra)** Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016-2021 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Mengingat :

1. UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58);
3. UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (lembaran Negara Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lemnbaran Negara No 4438);
4. UU nomor 17 tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 nomo 33, tambahan lembaran Negara nomor 4438);

5. PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran Negara tahun 2007 nomor 89, Tambahan lembaran Negara nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah (lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 3);
11. Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 21 tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Permendagri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19/Permentan/HK.140/4/2015 tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2015-2019;
14. Peraturan Daerah Provinsi jambi nomor 12 Tahun 2013 tentang RTRW Wilayah Tanjung Jabung Barat;
15. Peraturan Daerah Kab.Tanjung Jabung Barat nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah, Perda Kab.Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tentang Lembaga Teknis Daerah;
16. Perda Kab Tanjung Jabung Barat tentang RTRW Kab Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033;
17. Perda Kab.Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang RPJPD Tahun 2005-2025;
18. Perda Kab.Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kab.Tanjab Barat No 23);
19. Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan;

21. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 050/683/Bappemdal/2016 Tentang Pengesahan Rencana Strategis SKPD Kab.Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 Dinas Peternakan Kab.Tanjung Jabung Barat;
22. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 050/909/Bappemdal/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 050/683/Bappemdal/2016 Tentang Pengesahan Rencana Strategis SKPD Kab.Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 Dinas Perkebunan Kab.Tanjung Jabung Barat;
23. Surat Edaran Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 050/2080/Bappeda Tentang Pedoman Penyusunan Renstra Kab.Tanjung Jabung Barat 2016-2021;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan **Rencana Strategis (Renstra)** Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab.Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal Keputusan ini dibuat dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : KUALA TUNGKAL
TANGGAL : 13-01-2017

**KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**


Ir. M. L. M. BANGUN
Pembina Utama Muda
Nip. 1961215 199303 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tanjung Jabung Barat sebagai laporan,
2. Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat sebagai laporan,
3. Sekretaris Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat sebagai laporan,
4. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kab.Tanjung Jabung Barat,
5. Arsip.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan dokumen perencanaan yg memuat Program dan Kegiatan Strategis yg akan dilaksanakan selama 5 tahun kedepan (2016-2021). Untuk mewujudkan hal tersebut ditetapkanlah **Visi** :

**“ TERWUJUDNYA PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
BERKELANJUTAN, BERDAYA SAING DAN BERKUALITAS
MENUJU KETESEEDIAAN PANGAN DAN KESEJAHTERAAN
PETANI”**

Untuk mewujudkan Visi tersebut Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan 3 (tiga) **Misi** sebagai berikut :

Kode	MISI
M.1	Meningkatkan Produksi dan Produktivitas komoditi Perkebunan dan Peternakan dalam rangka memenuhi ketersediaan pangan sekaligus untuk meningkatkan pendapatan Petani dan Peternak serta kesejahteraan masyarakat.
M.2	Memanfaatkan dan mengoptimalkan IPTEK yang ramah lingkungan serta memberikan nilai tambah bagi Petani dan Peternak, sekaligus mendukung peningkatan Kualitas Produk Perkebunan dan Peternakan serta pengembangan Sumber Energi.
M.3	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pembangunan Perkebunan dan Peternakan.

Dalam upaya mewujudkan 3 (tiga) Misi tersebut telah ditetapkan 4 (empat) **Tujuan Strategis (TS)** yakni :

Kode	Tujuan Strategis (TS)
T.1	Meningkatkan Populasi dan Produksi komoditi Perkebunan dan Ternak.
T.2	Mengurangi angka kematian dan kesakitan ternak dan meningkatkan mutu hasil Perkebunan dengan memanfaatkan

IPTEK.

- T.3** Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya Perkebunan dan Peternakan secara optimal dan berkelanjutan.
- T.4** Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana pembangunan Perkebunan dan Peternakan.

Untuk mewujudkan **Tujuan Strategis (TS)** ditetapkanlah 8 (delapan) **Sasaran Strategis (SS)** dengan 14 (empat belas) **Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)** sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	
SS1	Meningkatnya Produksi Daging Ternak.	Produksi Daging Ternak (kg) :	
		Daging Sapi	378.567 kg
		Daging Kerbau	13.903 kg
		Daging Kambing	60.469 kg
		Daging Domba	608 kg
		Daging Unggas	2.524.952 kg
		Kelahiran Ternak Sapi IB	1.500 Ekor
SS2	Meningkatnya Populasi Ternak	Populasi Ternak (ekor) :	
		Sapi	8.096 ekor
		Kerbau	646 ekor
		Kambing	40.435 ekor
		Domba	670 ekor
		Unggas	1.335.957 ekor
SS3	Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan.	Produksi Komoditi Perkebunan (ton) :	
		Sawit	147.790 ton
		Karet	15.863 ton
		Kelapa	61.635 ton
		Kopi	1.367 ton
		Pinang	12.375 ton

Kode	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS4	Menurunnya Angka Kematian Ternak.	Persentase Kematian Ternak minimal 1.5 %
SS5	Meningkatnya Mutu Hasil Perkebunan dengan Memamfaatkan IPTEK	Pengembangan Agrobisnis Sektor Perkebunan : 1 sentra agrobisnis
		Penerapan IPTEK Budidaya dan Pascapanen tanaman perkebunan : 6 kelompok tani
		Tersedianya Blok Penghasil Tinggi : 3 Komiditi

Kode	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	
SS6	Meningkatnya pengelolaan Lahan Produktif	Bertambahnya Luas Lahan Perkebunan (Ha) :	
		Luas Lahan Sawit	56.294 Ha
		Luas Lahan Karet	15.806 Ha
		Luas Lahan Kelapa	56.294 Ha
		Luas Lahan Kopi	3.310 Ha
		Luas Lahan Pinang	11.800 Ha
SS7	Meningkatnya SDM Pelaku Usaha Perkebunan dan Penguatan serta Pengembangan Kelembagaan.	Jumlah Petani Perkebunan yg mengikuti Pelatihan Sistem Kebersamaan Ekonomi (SKE): 60 kelompok Tani	
		Penguatan Kelembagaan kelompok Petani : 30 Asosiasi	
		Jumlah STD-B yg dimiliki Petani Perkebunan : 6.000 STD-B Agrobisnis.	
		Jumlah Kelompok Peternak yg menerapkan Teknologi Peternakan : 9 kelompok	

Kode	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS8	Meningkatnya sarana dan prasarana Pembangunan Perkebunan dan Peternakan	Terbangunnya Jalan Produksi Perkebunan : 40 km
		Jumlah Kelompok Tani yg menggunakan Peralatan untuk Budidaya dan Pasca Panen : 36 Kelompok

Untuk mewujudkan *Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan* Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilakukan melalui 15 (lima belas) **Program** antara lain :

Kode	Program
01	Program pelayanan Administrasi Perkantoran
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
22	Program peningkatan produksi hasil peternakan
23	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
24	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
25	Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan
29	Program Pengembangan Data/Informasi Perkebunan
30	Program Pengembangan Data/Informasi Peternakan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
SURAT KEPUTUSAN	
KATA PENGANTAR	
RINGKASAN EKSEKUTIF	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	
2.1 TUPOKSI dan Struktur Organisasi	11
2.2 Sumber Daya SKPD	36
2.3 Kinerja Pelayanan 2011-2015	40
2.3.1 Bidang Perkebunan	40
2.3.2 Bidang Peternakan	47
2.4 Tantangan dan Peluang Pembangunan Bidang Perkebunan dan Peternakan	51
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	54
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi	54
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	57
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019 dan Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Jambi	60
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan KLHS	72
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	77
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN Dan SASARAN, STRATEGI Dan KEBIJAKAN	
4.1 Visi	91
4.2 Misi	92
4.3 Tujuan dan Sasaran Strategis Jangka Menengah Dinas Perkebunan dan Peternakan	92
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	103
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	110
BAB VII PENUTUP	113
LAMPIRAN	
Lampiran 1	Matriks Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Rencana Strategis (*Renstra*) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan suatu dokumen perencanaan strategis yang disusun secara rinci oleh satuan kerja perangkat daerah untuk jangka waktu 5 Tahun, yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam rencana kerja SKPD setiap tahun yang terintegrasi melalui program dan kegiatan guna pencapaian visi, misi dan arah pembangunan jangka menengah.

Berdasarkan prinsip kebutuhan, keterpaduan dan berkelanjutan, maka penyelenggaraan pembangunan sektor peternakan dituangkan dalam Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021 pada prinsipnya tetap melanjutkan kebijakan prioritas pembangunan sektor Perkebunan dan Peternakan sebelumnya. Kesenambungan penetapan sasaran pembangunan Perkebunan dan Peternakan merupakan penjabaran dari program prioritas pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

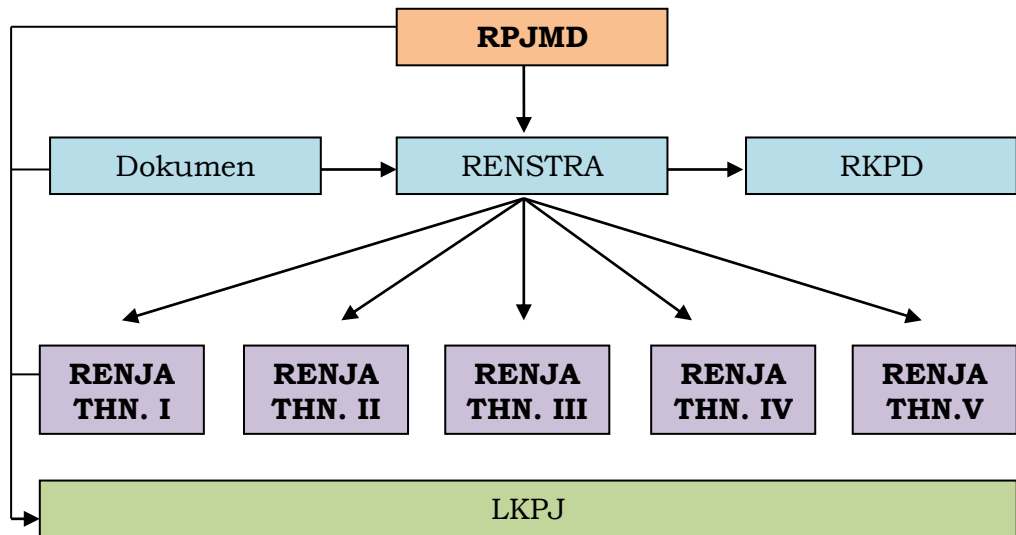
Rencana Strategis (*Renstra*) merupakan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal yang responsive dalam jangka panjang terhadap kondisi yang dihadapi daerah, berorientasi kedepan dan berupaya membangun masyarakat berbasis perspektif kebutuhan daerah, dengan memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan

ancaman (*threats*) yang ada. Rencana strategis instansi pemerintah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta bersifat indikatif.

Renstra Satuan Kerja merupakan Dokumen Perencanaan yang menjabarkan isu-isu permasalahan strategis pembangunan daerah yang menjadi kewenangan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta program-program strategis yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan secara terencana, bertahap dan mempunyai tolak ukur serta target pencapaian kinerja yang jelas melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan turunan/ penjabaran lebih lanjut dari **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)** Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan visi dan misi Kepala Daerah terpilih dan merupakan Pedoman Perencanaan bagi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan maupun rencana unit pelaksana teknis yang ada dibawah Dinas Perkebunan dan Peternakan.

Untuk mendapatkan dukungan yang optimal dalam implementasinya maka proses penyusunan Renstra SKPD perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua *stakeholder* melalui proses yang transparan, demokratis, terpadu dan akuntabel. Tanpa perencanaan strategis yang baik maka instansi pemerintah kemungkinan besar tidak akan dapat mencapai

tujuannya. Bagan alur kedudukan Renstra dapat dilihat pada gambar berikut ini :



1.2 Landasan Hukum Penyusunan Renstra

Renstra ini merupakan Dokumen Perencanaan Strategis untuk menjabarkan potret permasalahan pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat seperti yang telah dituangkan dalam indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan tersebut secara bertahap melalui sumber pembiayaan APBD dan APBN. Oleh karenanya, landasan penyusunan Renstra Pembangunan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021 ini adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58,
- 3) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 4) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2015 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
- 5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah;
- 13) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
- 17) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tanjung Jabung Barat;
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Dewan, Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah;
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033;
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015-2025;
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23);

- 22) Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 23) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan;
- 24) Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 050/683/Bappemdal/2016 Tentang Pengesahan Rencana Strategis SKPD Kab.Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 Dinas Peternakan Kab.Tanjung Jabung Barat;
- 25) Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 050/909/Bappemdal/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 050/683/Bappemdal/2016 Tentang Pengesahan Rencana Strategis SKPD Kab.Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 Dinas Perkebunan Kab.Tanjung Jabung Barat;

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud.

Maksud penyusunan Rencana Strategis (**Renstra**) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021 ini disusun sebagai acuan resmi bagi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, swasta, dan masyarakat umum dalam pembangunan bidang Perkebunan dan Peternakan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program/kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam

rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah secara berjenjang.

b. Tujuan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (**Renstra**) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 :

1. Menjabarkan secara umum kondisi sektor Perkebunan dan Peternakan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sekaligus menjelaskan arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu tertentu dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021;
2. Memberi arah kebijakan perencanaan serta prioritas pembangunan bidang Perkebunan dan Peternakan tahun 2016-2021;
3. Memudahkan seluruh jajaran Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021 dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur;
4. Sebagai pedoman dalam pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban, dan evaluasi kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.4 Sistematika Penulisan

**Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten
Tanjung Jabung Barat 2016 - 2021** disusun dengan *Sistematika
Penulisan* sebagai berikut :

**HALAMAN JUDUL
SURAT KEPUTUSAN
KATA PENGANTAR
RINGKASAN EKSEKUTIF
DAFTAR ISI**

BAB I. PENDAHULUAN.

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT.

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumberdaya Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan dan
Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung 2011-2015
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pembangunan Bidang
Perkebunan dan Peternakan 2016-2021.

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT.

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.
- 3.3. Telaah Renstra K/L.
- 3.4. Telaah RTRW Tanjung Jabung Barat dan KLHS Tanjung Jabung Barat
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN.

- 4.1. Visi Dinas Perkebunan dan Peternakan
- 4.2. Misi Dinas Perkebunan dan Peternakan
- 4.3. Tujuan dan Sasaran Strategis Jangka Menengah Dinas Perkebunan dan Peternakan
- 4.4. Strategi dan Kebijakan Dinas Perkebunan dan Peternakan.

BAB V. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.

BAB VI. INDIKATOR KINERJA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.

BAB VII. PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas Pokok dan Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dalam bagian kedua pasal 6 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibagi menjadi dua urusan terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Urusan wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi 26 urusan, sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata dan berpotensi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan yang penentunya diserahkan pada daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhannya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang menegaskan bahwa Dinas Perkebunan dan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah kabupaten di bidang Perkebunan dan Peternakan.

Selanjutnya untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan mempunyai fungsi yaitu :

- a. Menyusun rencana strategi dan akuntabilitas kinerja dinas;
- b. Merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis dilingkungan dinas Peternakan;
- c. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan dinas dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup dinas;
- e. Membina **Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)**; dan
- f. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari:

1. 1 (satu) orang Kepala Dinas
2. 1 (satu) orang Sekretaris
3. 4 (empat) orang Kepala Bidang
4. 15 (lima belas) orang Kasi

Struktur Organisasi Dinas Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program.

- c. Bidang Prasarana dan Sarana terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu:
 - 1. Seksi Lahan dan Irigasi.
 - 2. Seksi Pupuk Pestisida, Alat dan Mesin.
 - 3. Seksi Pembiayaan dan Investasi.
- d. Bidang Perkebunan terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu:
 - 1. Seksi Perbenihan
 - 2. Seksi Produksi
 - 3. Seksi Perlindungan
- e. Bidang Peternakan terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu:
 - 1. Seksi Pembibitan dan Produksi.
 - 2. Seksi Pengembangan dan Penyebaran Ternak
 - 3. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- f. Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu:
 - 1. Seksi Penyuluhan.
 - 2. Seksi Pengolahan.
 - 3. Seksi Pemasaran.
- g. **Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)**, terdiri dari :
 - 1. UPTD Lab. Hayati
 - 2. UPTD Pelabuhan Dagang Kecamatan Tungkal Ulu
 - 3. UPTD Kecamatan Bram Itam
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

1. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Kabupaten di bidang perkebunan dan peternakan;
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun rencana strategi dan akuntabilitas kinerja dinas;
 - b. Menyiapkan rumusan kebijakan dan petunjuk teknis dilingkungan dinas Perkebunan dan Peternakan;
 - c. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan dinas dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - d. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup dinas;
 - e. Membina Unit Pelaksanaan Tekhnis Dinas (UPTD) dan;
 - f. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya.

Sekretaris

1. Sekretaris mempunyai Tugas Pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dibidang kesekretariatan
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategi dan akuntabilitas kinerja dinas;

- b. Melaksanakan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan kegiatan kesekretariatan;
- c. Melaksanakan pelayanan administrasi kesekretariatan dinas yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- d. Menginventarisir permasalahan dan solusi pemecahannya terkait lingkup tugas;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas;
- f. Mengkoordinasikan tugas dan kegiatan bidang-bidang dan
- g. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya.

BIDANG PRASARANA DAN SARANA

1. Kepala Bidang Produksi dan Pengembangan Usaha Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perumusan, pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana perkebunan dan peternakan.
2. Dalam melaksanakan tugas Bidang Prasarana dan Sarana menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja bidang prasarana dan sarana;
 - b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengembangan potensi, pengelolaan lahan, irigasi perkebunan dan peternakan;

- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, perhitungan penyediaan, pengawasan peredaran dan pendaftaran serta penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat mesin perkebunan, peternakan;
- d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pengembangan, pembiayaan dan investasi perkebunan dan peternakan, tata cara usaha perkebunan dan peternakan, bantuan permodalan, rekomendasi perizinan perkebunan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Lahan dan Irigasi

Seksi Lahan dan Irigasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Dan Seksi Lahan dan Irigasi dipimpin oleh Kepala Seksi.

- (1) Seksi Lahan dan Irigasi mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian lingkup pengelolaan lahan dan irigasi.
- (2) Seksi Lahan dan Irigasi mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran seksi lahan dan irigasi;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan dan

- penyediaan lahan, jalan usaha tani, jaringan irigasi lahan Perkebunan dan Peternakan;
- c. Melakukan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan Perkebunan dan Peternakan;
 - d. Melakukan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian pelaksanaan kegiatan Seksi Lahan dan Irigasi Perkebunan dan peternakan; dan
 - e. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan terkait dengan tugasnya.

Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin

- (1) Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penghitungan, pengawasan perendaran, penjaminan mutu, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian lingkup pupuk, pestisida, alat dan mesin perkebunan dan peternakan.

Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin mempunyai uraian tugas pekerjaan :

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran seksi pupuk, pestisida, alat dan mesin;

- b. Melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pupuk, pestisida, alat dan mesin perkebunan dan peternakan;
- c. Melakukan penghitungan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin perkebunan dan peternakan;
- d. Melakukan pengawasan peredaran dan pendaftaran serta penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin serta dan peternakan;
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian pelaksanaan kegiatan Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Perkebunan dan peternakan; dan
- f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Seksi Pembiayaan dan Investasi.

- (1) Seksi Pembiayaan dan Investasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pembiayaan dan Investasi dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pembiayaan dan Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan pendampingan dan supervisi, tatacara usaha, rekomendasi perizinan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian lingkup pembiayaan dan investasi perkebunan dan peternakan;

Seksi Pembiayaan dan Investasi mempunyai uraian tugas pekerjaan :

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran seksi pembiayaan dan investasi;
- b. Melakukan penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembiayaan dan investasi, bimbingan pendampingan dan supervisi pembiayaan dan investasi serta fasilitasi pelayanan investasi perkebunan dan peternakan;
- c. Melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan pembiayaan dan investasi di bidang perkebunan dan peternakan ;
- d. Melakukan pemberian informasi dan rekomendasi tata cara usaha perkebunan dan peternakan dan bantuan permodalan di bidang perkebunan dan peternakan ;
- e. Melaksanakan tata cara usaha, pemberian izin/rekomendasi teknis dibidang perkebunan dan peternakan;
- f. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan pembiayaan dan investasi di bidang perkebunan dan peternakan;
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan terkait dengan tugasnya.

BIDANG PERKEBUNAN

(1) Bidang Perkebunan berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Perkebunan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi dan pelaporan bidang perkebunan.

Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang perkebunan;
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, pengawasan dan evaluasi perbenihan perkebunan, pengujian mutu benih, sertifikasi benih, pengendalian sumber benih, perencanaan kebutuhan benih dan pengembangan varitas unggul, bimbingan teknis perbenihan dan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih;
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi rencana tanam dan produksi, bimbingan peningkatan mutu dan produksi, penerapan teknologi budidaya perkebunan dan bimbingan pasca panen serta pemasaran hasil perkebunan;
- d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penyediaan dan pengawasan penggunaan benih, pengendalian dan pengamatan OPT, bimbingan kelembagaan OPT,

penanggulangan bencana, pencegahan dan perlindungan perkebunan; dan

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Perbenihan.

- (1) Seksi Perbenihan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Perbenihan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Perbenihan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengawasan, pengujian, sertifikasi benih, pengendalian sumber benih, merencanakan kebutuhan benih, pengembangan vaeritas unggul pemberian bimbingan produksi benih, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di lingkup perbenihan perkebunan.

Seksi Perbenihan mempunyai uraian tugas pekerjaan :

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran seksi perbenihan;
- b. Melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengawasan, pengujian mutu benih, sertifikasi benih, pengendalian sumber benih, merencanakan kebutuhan benih dan pengembangan vaeritas unggul di bidang perkebunan;
- c. Melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar dibidang perkebunan;
- d. Melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang perkebunan;
- e. Melakukan pemberian bimbingan teknis perbenihan dan Pengolahan di bidang Perkebunan;

- f. Melakukan pemantauan, evaluasi dan penyusunan pelaporan serta pendokumentasian kegiatan seksi perbenihan perkebunan; dan
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Seksi Produksi.

(1) Seksi Produksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(2) Seksi Produksi dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Produksi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan anggaran, penyiapan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian lingkup produksi perkebunan.

Seksi Produksi mempunyai uraian tugas pekerjaan :

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran seksi produksi;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang produksi perkebunan.
- c. Melakukan penyiapan bahan rencana tanam dan produksi di bidang perkebunan.
- d. Melakukan pemberian bimbingan peningkatan mutu dan produksi perkebunan dan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang perkebunan.
- e. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan serta pendokumentasian kegiatan produksi perkebunan; dan

- f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Seksi Perlindungan

- (1) Seksi Perlindungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Perlindungan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Perlindungan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, penyediaan dan pengawasan peredaran benih, pengendalian, bimbingan teknis, pengamatan, pengolahan, penanggulangan bencana, pemberian rekomendasi pemantauan evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian dilingkup perlindungan.

Seksi Perlindungan mempunyai uraian tugas pekerjaan :

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran seksi perlindungan;
- b. Melakukan penyediaan dan pengawasan peredaran/ penggunaan benih, bahan pengendalian OPT, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT serta pengolahan data OPT bidang Perkebunan;
- c. Melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT dan bahan sekolah lapangan pengendalian hama terpadu serta bimbingan teknis perlindungan dan Pengolahan Perkebunan;

- d. Melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam, gangguan kebakaran lahan dan kebun dan gangguan usaha perkebunan;
- e. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan perlindungan perkebunan;
- f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

BIDANG PETERNAKAN

- (1) Bidang Peternakan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Peternakan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, kebijakan, pelaksanaan, perencanaan kebutuhan, pembinaan bimbingan, pengendalian penyakit, pengawasan peredaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang peternakan.

Bidang Peternakan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi serta pelaporan program dan rencana di bidang peternakan;
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengendalian, penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, hijauan pakan ternak, pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit HPT, pengujian benih/bibit HPT, pengelolaan sumber daya genetik hewan dan pemberdayaan kelompok peternak serta bimbingan produksi ternak;

- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi identifikasi calon lokasi penyebaran ternak dan calon penggaduh ternak, penyusunan kawasan sentra produksi ternak dan kawasan Perkebunan dan Peternakan terpadu, menyusun standard pola gaduhan ternak pemerintah, dan redistribusi ternak serta penilaian ternak;
- d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi kesehatan hewan dan masyarakat veteriner, pengawasan peredaran obat hewan, pemotongan hewan, penanggulangan penyakit zoonosis, penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pembibitan dan Produksi

(1) Seksi Pembibitan dan Produksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(2) Seksi Pembibitan dan Produksi dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pembibitan dan Produksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi benih/bibit, pakan, dan produksi lingkup perbibitan dan produksi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pembibitan dan Produksi mempunyai uraian tugas pekerjaan :

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Pembibitan dan Produksi;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan benih/bibit, pakan, dan produksi di bidang peternakan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan, benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak serta pengendalian penyediaan dan peredaran hijauan pakan ternak (HPT), pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit HPT dan bahan pengujian benih/bibit HPT;
- d. Melakukan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
- e. Melakukan penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak dan pemberian bimbingan peningkatan produksi ternak;
- f. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Benih/Bibit, dan Produksi Peternakan; dan
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan, terkait dengan tugasnya.

Seksi Pengembangan dan Penyebaran Ternak.

- (1) Seksi Pengembangan dan Penyebaran Ternak berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengembangan dan Penyebaran Ternak dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pengembangan dan Penyebaran Ternak mempunyai tugas melakukan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian

bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, identifikasi lokasi penyebaran dan pengembangan kawasan ternak, penyiapan lokasi dan peternak, mengelola administrasi gaduhan ternak, penilaian ternak Pemerintah dan redistribusi ternak lingkup Pengembangan dan Penyebaran Ternak.

Seksi Pengembangan dan Penyebaran Ternak mempunyai uraian tugas pekerjaan :

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran seksi Pengembangan dan Penyebaran Ternak;
- b. Melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pengembangan dan Penyebaran Ternak;
- c. Melakukan identifikasi calon lokasi penyebaran ternak dan calon penggaduh ternak;
- d. Melakukan penyusunan kawasan sentra produksi ternak, kawasan Perkebunan dan Peternakan terpadu, penyusunan standard pola gaduhan ternak pemerintah dan mengkoordinasikan lokasi kawasan Perkebunan dan Peternakan terpadu berdasarkan kesepakatan bersama;
- e. Melakukan rencana sarana dukungan kerjasama dengan provinsi dan pusat dalam Pengembangan dan Penyebaran Ternak;
- f. Melaksanakan administrasi gaduhan ternak, pelaksanaan redistribusi ternak dan penilaian ternak pemerintah;
- g. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan pendokumentasian kegiatan Pengembangan dan Penyebaran Ternak; dan

- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

- (1) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian lingkup kesehatan hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner.

Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- b. Melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat veteriner;
- c. Melakukan pemantauan, pengawasan peredaran obat hewan dan mengevaluasi pelayanan kesehatan hewan;
- d. Penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan, bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi

- usaha produk hewan serta mengawasi pelaksanaan pelayanan pemotongan hewan;
- e. Melakukan pengawasan menanggulangi penyakit Zoonosis dan melakukan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
 - f. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan serta pendokumentasian kegiatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner ;dan
 - g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

BIDANG PENYULUHAN, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN

- (1) Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, fasilitasi, koordinasi, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang Penyuluhan, pengolahan serta pemasaran perkebunan dan peternakan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja bidang penyuluhan, pengolahan dan pemasaran;
- b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rencana pembinaan dan pemberdayaan bagi penyuluhan, pekebunan dan peternakan, penyusunan jadwal penyuluhan, pembinaan lembaga petani, penyediaan, penyebaran dan pelayanan informasi penyuluhan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi bimbingan teknis dan pengembangan unit pengolahan hasil, penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil, penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB), pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP);
- d. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi bimbingan dan pengembangan Pemasaran hasil, promosi produk, pelayanan dan pengembangan informasi pasar Perkebunan dan Peternakan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Penyuluhan

(1) Seksi Penyuluhan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(2) Seksi Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pemberian bimbingan teknis dan pembinaan serta pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian lingkup penyuluhan perkebunan dan peternakan

Seksi Penyuluhan mempunyai uraian tugas pekerjaan :

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran seksi penyuluhan;
- b. Melakukan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis penyuluhan perkebunan dan peternakan;
- c. Melakukan penyusunan rencana dan jadwal penyelenggaraan penyuluhan, penyiapan pelaksanaan penyebaran materi, metode penyuluhan dan bahan penyediaan, penyebaran dan pelayanan informasi penyuluhan;
- d. Melakukan penyusunan bahan pembinaan dan supervisi penyuluhan perkebunan dan peternakan, pembinaan menumbuh kembangkan lembaga petani dan rencana pembinaan serta pemberdayaan bagi penyuluhan perkebunan dan peternakan;
- e. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian pelaksanaan kegiatan penyuluhan perkebunan dan peternakan; dan
- f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Seksi Pengolahan.

(1) Seksi Pengolahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(2) Seksi Pengolahan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pengolahan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, penyiapan bahan penyusunan bimbingan dan pengembangan, penerapan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian pengolahan hasil di bidang Perkebunan dan Peternakan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pengolahan mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan Perkebunan dan Peternakan;
- b. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil, dan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang Perkebunan dan peternakan;
- c. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) dibidang Perkebunan dan peternakan ;
- d. melkukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan di bidang Perkebunan dan peternakan;
- e. melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian pelaksanaan kegiatan Pengolahan di bidang Perkebunan dan peternakan; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Seksi Pemasaran.

(1) Seksi Pemasaran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(2) Seksi Pemasaran dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemasaran hasil di bidang Perkebunan dan peternakan.

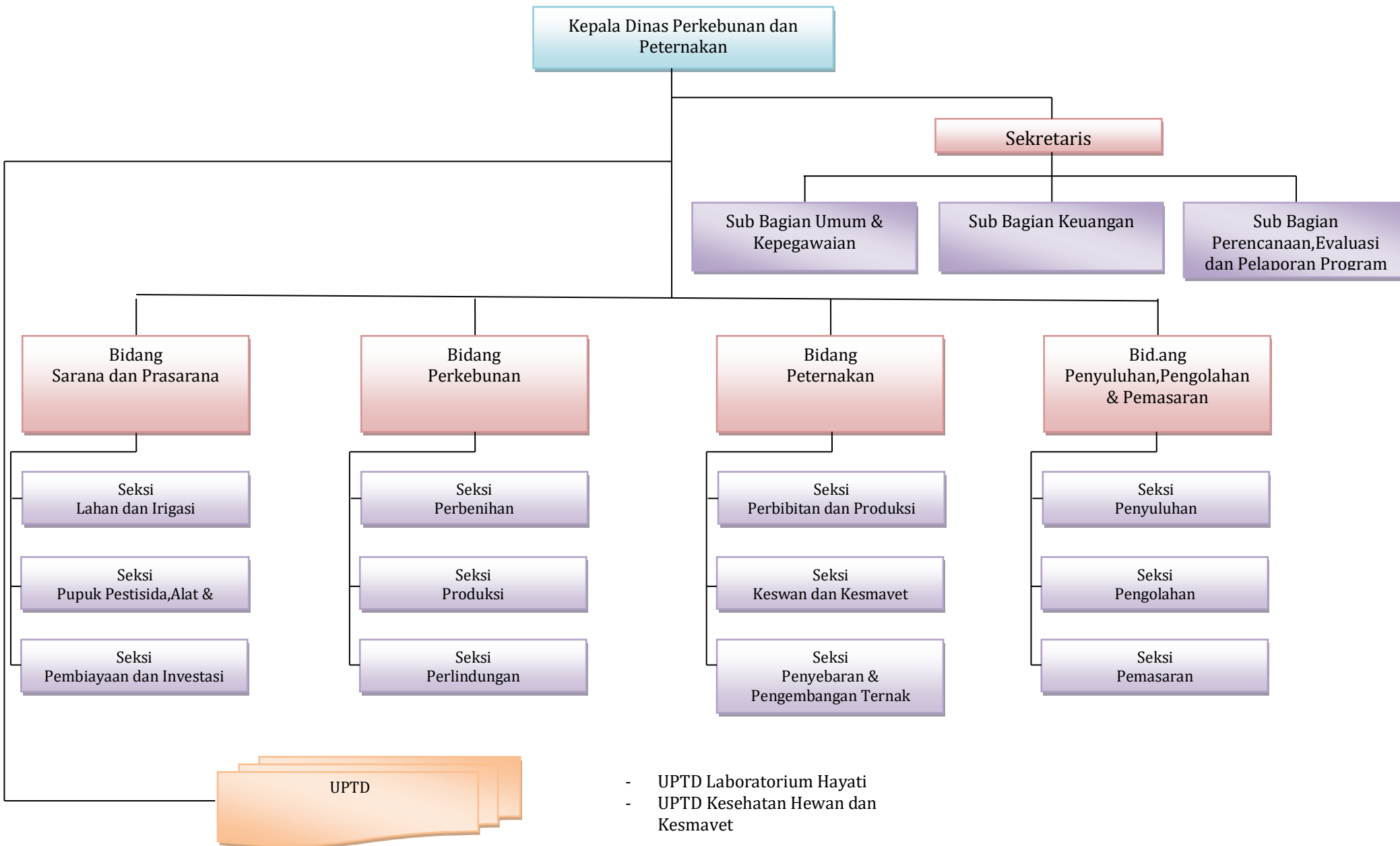
Seksi Pemasaran mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran seksi pemasaran;
- b. melakukan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan Pemasaran hasil Perkebunan dan peternakan;
- c. penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan Pemasaran dan hasil Perkebunan peternakan, dan pemberian bimbingan teknis pemasaran hasil di bidang Perkebunan dan peternakan;
- d. melakukan fasilitasi promosi produk di bidang Perkebunan dan peternakan;
- e. pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang Perkebunan dan Peternakan ;
- f. melakukan pemantaua, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan pemasaran di bidang Perkebunan dan peternakan; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Kelompok Jabatan fungsional

1. Kelompok jabatan fungsional pada masing-masing Dinas terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya
2. Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diangkat oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas
3. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2016-2021



2.2. Sumber Daya pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.



Dalam Rangka mendukung tugas pokok dan Fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai baik kualitasnya

maupun kuantitas. Selanjutnya Data SDM ASN Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

Tabel 2.1 Data ASN Dinas Perkebunan dan Peternakan Berdasarkan Golongan Ruang dan Tingkat Pendidikan Tahun 2017

No	Gol/Ruang	Jumlah	Tingkat Pendidikan			
			SLTA	Diploma	S1	S2
1	2	3	4	5	6	7
1	IV/c	1	-	-	1	-
2	IV/b	3	-	-	3	-
3	IV/a	2	-	-	1	1
4	III/d	13	4	-	9	-
5	III/c	9	2	1	5	1
6	III/b	3	-	-	3	-
7	III/a	2	1	-	1	-
8	II/d	3	3	-	-	-
9	II/c	3	3	-	-	-
10	II/b	4	4	-	-	-
11	II/a	-	-	-	-	-
12	TKK/TKS	36	26	-	9	-
	Jumlah total	88	43	1	31	2

Unit Pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan

Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat Dinas Perkebunan dan Peternakan mempunyai 3 (tiga) unit UPTD masing-masing di *Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Bram Itam* dan *Kecamatan Tungkal Ulu*. Selain adanya UPTD Dinas Perkebunan dan Peternakan juga mempunyai **Pos Keswan dan IB**.

Untuk pelayanan kesehatan hewan Dinas Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai 5 (lima) pos keswan, 5 petugas Medis dan 6 petugas para medis yang tersebar di masing-masing Kecamatan. (Tabel 2.2)

Tabel 2.2 Jumlah Petugas Medis dan Paramedis Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No.	Kecamatan	Petugas Medis	Petugas Paramedis	Keterangan
1	Tungkal Ilir	3	1	Medis PNS 3 orang , paramedis Tenaga honorer 1 orang
2	Betara	-	1	-
3	Pengabuan	-	1	PNS
4	Senyerang	-	1	Tenaga Honorer
5	Tungkal Ulu	1	1	Tenaga Honorer
6	Merlung	1	1	Tenaga Honorer
7	Batang Asam	-	1	Tenaga Honorer



Dilihat dari jangkauan lokasi dan medan yang cukup berat jumlah petugas medis dan paramedis masih sangat minim. Untuk optimalnya masing-masing Kecamatan mempunyai 1 (satu) unit pos keswan dan 1 (satu) orang

petugas medis dan dibantu 2 orang petugas paramedis.

Untuk meningkatkan populasi dan produktivitas ternak salah satu usaha dengan program inseminasi buatan (IB) dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas ternak baik kualitas maupun kuantitas.

Jumlah Pos IB di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ada 11 unit dengan petugas IB sebanyak 12 orang, petugas PKB 8 orang dan petugas ATR 7 orang yang tersebar dimasing-masing Kecamatan (Tabel 2.3)

Tabel 2.3 Jumlah Petugas IB, PKB, ATR dan Recorder di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No.	KECAMATAN	PETUGAS IB	PETUGAS PKB	PETUGAS ATR
1	TUNGKAL ILIR	-	2	2
2	BRAMITAM	1	1	1
3	SEBERANG KOTA	-	-	-
4	BETARA	3	-	-
5	KUALA BETARA	-	-	-
6	PENGABUAN	1	1	1
7	SENYERANG	3	1	1
8	TUNGKAL ULU	1	1	1
9	TEBING TINGGI	1	-	-
10	MUARA PAPALIK	1	-	-
11	BATANG ASAM	1	1	-

12	MERLUNG	-	1	1
13	RENAH MENDALUH	-	-	-
TOTAL		12	8	7

Aset/Modal

BIDANG PETERNAKAN.

Adapun Sarana dan Perlengkapan pada Bidang Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tercatat sampai dengan Desember 2016 antara lain :

No	Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga
1	Tanah	3	118.000.000,-
2	Peralatan dan Mesin	313	2.318.711.806,-
3	Gedung dan bangunan	35	3.035.577.850,-
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	6	256.607.700,-
5	Aset tetap lainnya	2.720	1.459.950.000,-
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	1	20.995.000,-
7	Aset Lainnya	344	702.908.000,-
Total		3.442	7.912.750.356,-

BIDANG PERKEBUNAN.

Adapun Sarana dan Perlengkapan pada Bidang Perkebunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tercatat sampai dengan Desember 2016 antara lain :

No	Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga
1	Tanah	11	772.453.500,-
2	Peralatan dan Mesin	131	1.701.931.120,-
3	Gedung dan bangunan	12	230.056.000,-
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	7	186.735.000,-
5	Aset tetap lainnya	NIHIL	NIHIL
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	NIHIL	NIHIL
7	Aset Lainnya	7	17.429.900,-
Total		3.442	2.908.605.520,-

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan.

BIDANG PERKEBUNAN.



Pada tabel. 2.4. di bawah ini terlihat bahwa Capaian Kinerja Bidang Perkebunan selama 2011 sampai dengan 2015 cukup baik dengan capaian rata rata mencapai 90 %. Ada beberapa kegiatan yang target capaiannya didalam rencana kinerja lima tahunan 2011-2016 tidak mencapai target yang di harapkan, antara lain peremajaan kelapa, peremajaan karet dan pengembangan kakao, hal ini terjadi karena beberapa kendala antara lain, pengurangan pendanaan akibat

terjadinya devisa baik pendanaan dari APBD Kabupaten maupun APBN. Namun di komoditi yang lain seperti kelapa sawit dan pinang mengalami peningkatan yang cukup signifikan akibat harga komoditi tersebut bagus dan relatif stabil.

Capaian kinerja Bidang Perkebunan kabupaten Tanjung Jabung Barat dari sisi anggaran menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan capaian rata-rata realisasi anggaran mencapai 83 %, namun jika dilihat dari pertumbuhan anggaran dari 6 program unggulan hanya satu program yang mengalami pertumbuhan anggaran secara baik, sedangkan 5 program mengalami minus pertumbuhan. Progres capaian kinerja anggaran dapat dilihat dalam Tabel 2.4 dibawah ini.

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bidang Perkebunan
Tahun Anggaran 2011 - 2015 Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Uraian	TARGET					Realisasi					Rasio antara realisasi dan Anggaran					Rata-rata pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
1	Prog.Peningkatan Kesejahteraan Petani	70.818.002	72.068.000	191.773.900	209.929.600	135.399.900	70.818.001	66.051.000	169.030.150	181.374.200	107.122.225	100,0	91,7	88,1	86,4	79,1	-28,4%	-4,90%
2	program peningkatan ketahanan pangan	618.886.504	732.258.200	529.201.850	299.577.400	258.782.500	578.964.200	681.265.200	319.737.350	238.248.800	226.860.500	93,5	93,0	60,4	79,5	87,7	-16,1%	-3,20%
	(Pertanian/perkebunan)																	
3	peningkatan pemasaran hasil produksi																	
	pertanian/perkebunan	-	-	133.267.000	148.962.500	98.392.800	-	-	34.797.000	60.559.400	81.398.691	#DIV/0!	#DIV/0!	26,1	40,7	82,7	15,3%	17,30%
4	Prog. Peningkatan penerapan teknologi	-	-	282.729.000	-	-	-	-	101.194.000	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	35,8	#DIV/0!	#DIV/0!	20,0%	
	pertanian/perkebunan																	
5	Prog.Pengembangan Agribisnis	-	111.814.000	77.331.000	-	128.816.000	-	108.174.500	72.646.000	-	119.628.000	#DIV/0!	96,7	93,9	#DIV/0!	92,9	-8,9%	-0,60%
6	Prog.Peningkatan Produksi Perkebunan	1.748.356.507	2.833.055.000	4.374.678.550	4.280.977.700	1.329.132.400	1.688.826.400	2.942.292.560	3.404.318.400	3.517.210.740	1.116.007.690	96,6	103,9	77,8	82,2	84,0	-4,30	-3,80%
		3.056.947.517	4.593.267.400	6.195.514.150	5.736.166.100	2.444.952.500	2.917.572.801	4.587.222.960	4.494.106.250	4.671.603.240	2.080.683.006	95	73	73	75	85		

Tabel 2.5
Realisasi Rencana Strategis
Bidang Perkebunan Tahun Anggaran 2011 - 2015
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Program Bid. Perkebunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatkan SDM Petani Perkebunan				85%	85%	85%	90%	95%										
	(1) Pelatihan Pemberdayaan Petani SKE	50 kelas	50 kelas	Jumlah petani	10 kls	10 kelas	10 kelas	10 kelas	10 kelas	10 kelas	10 kelas	10 kelas	10 kelas	10 kelas	20%	20%	20%	20%	20%
	(2) Lomba Tani Perkebunan	45 klp	45 klp	Jumlah kelompok petani	-	45 Klp	45 Klp	45 Klp	45 Klp	-	-	-	45 klp	-	0%	0%	0%	20%	0%
	(3) Pembinaan kelembagaan dan Kemitraan Perkebunan	4 Asosiasi	4 Asosiasi	Jumlah Asosiasi yang dibina	-	4 aso	4 aso	4 aso	4 aso	-	4 Aso	4 Aso	-	5 Aso penilai & 19 pers	-	20%	20%	-	20%
Peningkatan ketahanan pangan perkebunan	Untuk mendukung peningkatan produksi, produktifitas dan mutu tanaman perkebunan				80%	80%	80%	90%	95%										
	(1) pengendalian hama penyakit tanaman	600 Ha	600 Ha	Jumlah lahan perkebunan yg dilakukan pengendalian hama	100 Ha	100 Ha	100 Ha	100 Ha	100 Ha	100 Ha	100 Ha	100 Ha	100 Ha	100 Ha	20%	20%	20%	20%	20%
	(2) peningkatan perlindungan usaha perkebunan	600 Ha	600 Ha		100 Ha	100 Ha	100 Ha	100 Ha	100 Ha	100 Ha	100 Ha	100 Ha	100 Ha	100 Ha	20%	20%	20%	20%	20%

Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2016-2021

	(3) pemetaan lahan perkebunan	5 kom	5 kom		1 kom	1 kom	1 kom	1 kom	1 kom	1 kom	1 kom	-	-	-	20%	20%	0%	0%	0%
	(4) dana sinergis program sarana pertanian/perkebunan	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	620 Batang paralon	-	-	-	0%	0%	20%	0%	0%
Peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan	Meningkatkan sarana prasarana pembangunan perkebunan																		
	(1) pengadaan sarana prasana pertania	85%		Jumlah bantuan sarana dan prasarana pertanian	-	0%	85%	90%	95%	-	-	10 unit pengupas kopi, 4500 m jaring babi, 20 unit lantai jemur, 425 batang paralon	1500 m jaring babi, 40 unit lantai jemur	-	0%	0%	20%	20%	0%
	(2) dana sinergis pengolahan hasil perkebunan				80%	80%	80%	90%	95%		6 unit alat pengolahan				20%	20%	20%	20%	20%
	(3) promosi pemasaran hasil perkebunan	85%		Tersedianya informasi harga komoditi perkebunan	-	-	100%	100%	100%			1 informasi harga 12 bulan	1 informasi harga 12 bulan	1 informasi harga 12 bulan	20%	20%	20%	20%	20%
Peningkatan penerapan teknologi perkebunan	Peningkatan penerapan IPTEK				85%	85%	85%	90%	95%										
	(1) pemeliharaan lanjutan kebun percontohan kelapa sawit	5 Ha	5 Ha		5 Ha	5 Ha	5 Ha	5 Ha	5 Ha	5 Ha	5 Ha	5 Ha	5%	5%	100%	100%	100%	100%	100%
	(2) integrasi ternak besar kelapa sawit	12 unit	12 unit		-	-	3 unit	3 unit	4 unit			3 unit	3 unit	-	0%	0%	20%	20%	0%

Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2016-2021

	(3) magang/pelatihan petani karet, kopi, kelapa dan sawit	125 org	125 org		25 org	25 org	25 org	25 org	25 org	-	25 org	25 org	-	-	0%	0%	20%	20%	0%
Peningkatan produksi perkebunan	Meningkatkan produksi dan produktifitas komoditi perkebunan, kelapa sawit, kelapa dalam, karet, kopi dan pinang				80%	80%	85%	85%	90%										
	(1) pembibitan kelapa sawit	70.000 kecambah	70.000 kecambah		15.000 kecambah	34.500 kecambah	30.000 kecambah	20.000 kecambah	25.000 kecambah	15.000 kecambah	34.500 kecambah	30.000 kecambah	20.000 kecambah	25.000 kecambah	21%	49%	43%	29%	29%
	(2) pemeliharaan lanjutan pembibitan kelapa sawit	1 Ha	1 Ha		1 Ha	1 Ha	1 Ha	1 Ha	1 Ha	1 Ha	2 Ha	2 Ha	2 Ha		20%	20%	20%	0%	
	(3) pembibitan/pemeliharaan pembibitan karet	1 Ha	1 Ha				1 Ha	1 Ha	1 Ha						0%	0%	0%	0%	0%
	(4) pemeliharaan kebun entres karet	4 Ha	4 Ha		4 Ha	4 Ha	4 Ha	4 Ha	4 Ha	4 Ha	4 Ha	4 Ha	4 Ha	4 Ha	20%	20%	20%	20%	20%
	(5) pemeliharaan Blok Penghasil Tinggi (BPT)	228 Ha	228 Ha		228 Ha	228 Ha	228 Ha	228 Ha	228 Ha	228 Ha	228 Ha	228 Ha	228 Ha	228 Ha	20%	20%	20%	20%	20%
	(6) penetapan/pemeliharaan BPT kopi exelse	50 Ha	50 Ha		50 Ha	50 Ha	50 Ha	50 Ha	50 Ha	50 Ha	50 Ha	50 Ha	50 Ha	50 Ha	20%	20%	20%	20%	20%
	(7) pengembangan/pe-remajaan kebun kelapa rakyat	2500 Ha	2500 Ha		500 Ha	500 Ha	500 Ha	500 Ha	500 Ha	500 Ha	500 Ha	600 Ha	500 Ha	200 Ha	20%	20%	20%	20%	20%
	(8) pengembangan/pe-remajaan kebun karet rakyat	870 Ha	870 Ha		50 Ha	70 Ha	150 Ha	250 Ha	100 Ha	50 Ha	70 Ha	150 Ha	250 Ha	250 Ha	6%	8%	17%	29%	11%
	(9) pembangunan kebun kakao rakyat	160 Ha	160 Ha				20 Ha	50 Ha	40 Ha			20 Ha	50 Ha						

Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2016-2021

	(10) pembinaan lintas sektoral	10 Desa	10 Desa		2 Desa	2 Desa	2 Desa	2 Desa	2 Desa	2 Desa	2 Desa	2 Desa	2 Desa	2 Desa					
	(11) intensifikasi kebun kopi rakyat	500 Ha	500 Ha				200 Ha	250 Ha	100 Ha			250 Ha	250 Ha						
	(12) pengembangan jaringan air dan lahan	1500 Ha	1500 Ha		500 Ha	600 Ha	425 Ha	500 Ha	500 Ha	500 Ha	600 Ha		425 Ha						
	(13) pengolahan data statistic perkebunan	20 Buku	20 Buku		20 Buku	20 Buku	20 Buku	20 Buku	20 Buku	20 Buku	20 Buku	20 Buku	20 Buku	20 Buku					

Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan salah satu SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang perkebunan dan peternakan berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Perkebunan dan Peternakan memberikan pelayanan umum bidang perkebunan dan peternakan. Adapun tabel untuk gambaran kinerja pelayanan Bidang Peternakan dapat dilihat pada tabel 2.6 dibawah ini :

Dari Tabel terlihat bahwa terjadi kenaikan populasi sapi dari 6.510 ekor ditahun 2011 menjadi 7.193 ekor di tahun 2015 dengan laju kenaikan 10,49 % selama 5 tahun. Peningkatan angka kelahiran ternak sapi tidak diiringi dengan peningkatan populasi secara signifikan, hal ini disebabkan karena banyaknya jumlah ternak yang dipotong dan banyaknya jumlah ternak yang dijual keluar daerah, selain itu untuk perhitungan populasi ternak tidak hanya dipengaruhi oleh angka kelahiran tetapi dipengaruhi juga dengan pemotongan ternak, pengeluaran ternak, pemasukan ternak dan kematian ternak. Hal yang sama juga terjadi pada ternak kerbau, dimana terjadi kenaikan populasi ternak kerbau dari 444 ekor ditahun 2011 menjadi 607 ekor pada tahun 2015 dengan laju kenaikan 36,71 % selama 5 tahun. Terjadinya peningkatan populasi ini perlu dipertahankan dalam rangka pemenuhan kebutuhan protein hewani di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.



Untuk ternak unggas ayam buras dan itik populasinya juga terus meningkat selama 5 tahun untuk pertumbuhan ayam buras 64% sedangkan ternak itik terjadi pertumbuhan 42,64 %. Sementara untuk ayam broiler (ayam pedaging) dan ayam ras petelur memang tidak dipelihara di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dikarenakan harga pakan yang cukup mahal sehingga kalau pemeliharannya dalam skala kecil, peternak tidak dapat keuntungan. Untuk memenuhi

kebutuhan daging ayam broiler pedagang langsung membeli ayam yang siap potong sehingga untuk konsumsi daging ayam broiler di Tanjab Barat masih mencukupi, begitu juga untuk telur ayam ras masih mendatangkan telur dari luar daerah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tugas dari Dinas Perkebunan dan Peternakan sesuai dengan tupoksi adalah melaksanakan urusan urusan pemerintahan daerah dibidang Perkebunan dan Peternakan berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut mempunyai fungsi :

1. Sebagai penyusun kebijakan dibidang perkebunan dan Peternakan.
2. Pelaksanaan dan pengendalian teknis.
3. Pembinaan dan perizinan sesuai bidangnya.
4. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh kepala daerah.

Dari uraian diatas untuk penunjang keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan pelayanan **Bidang Perkebunan** memiliki beberapa *tantangan* sebagai berikut :

1. Masih rendahnya produktifitas komoditi perkebunan dibandingkan dengan produktifitas nasional.
2. Rendahnya mutu hasil olahan/industri perkebunan yang menyebabkan rendahnya harga tawar akan produk komoditi perkebunan.

3. Tingkat SDM pelaku usaha perkebunan dan agroindustri perkebunan yang masih rendah dan kurang terampil menjadikan produk perkebunan tidak memiliki daya saing di pasar domestic dan regional.
4. Minimnya sarana dan prasarana serta informasi pasar yang dapat diakses oleh masyarakat perkebunan.
5. Masih tingginya serangan organisme pengganggu tanaman dan gangguan usaha perkebunan.

Adapun *peluang* yang akan mendukung pengembangan pelayanan yang akan dilakukan di **Bidang Perkebunan** yaitu :

1. Daerah strategis berada dalam kawasan pertumbuhan ekonomi.
2. Adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah.
3. Tersedianya potensi lahan yang memadai.
4. Terbukanya lapangan kerja dibidang perkebunan.
5. Tumbuhnya investasi tanaman perkebunan dan industry.
6. Pendanaan APBD berorientasi pada kinerja.

Tantangan yang dihadapi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mengimplementasi program pembangunan bidang Perkebunan dan peternakan dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai satuan kerja pemerintah daerah sangat beragam. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri mengingat permasalahan yang ada di bidang Perkebunan dan peternakan cukup kompleks. Untuk itu Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus berbenah diri dalam sistem pelayanan kepada masyarakat. Adapun *tantangan* yang dihadapi Dinas Perkebunan dan Peternakan Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di **Bidang Peternakan** antara lain :

1. Meningkatnya permintaan akan produk ternak seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, kesejahteraan dan pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Kondisi Perekonomian Global Perkembangan regional dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
3. Perubahan Iklim, kerusakan lingkungan dan bencana alam sangat berpengaruh terhadap kesehatan ternak sehingga sangat berpengaruh terhadap produktivitas ternak.
4. Harga Daging Sapi yang setiap tahun terus naik.

Selain tantangan yang dihadapi terdapat juga *peluang* untuk perkembangan pembangunan di *Bidang Peternakan* antara lain :

1. Masih luas lahan untuk sektor peternakan.
2. Integrasi sapi sawit.
3. Pemasaran produk peternakan berdekatan dengan SIJORI.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan

A. BIDANG PETERNAKAN.



Pelaksanaan Pembangunan Perkebunan dan Peternakan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2011-2016 dapat memberikan manfaat maupun dampak positif yang bisa dirasakan oleh

petani, tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan ataupun kendala yang dihadapi.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan di *Bidang peternakan* Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain yaitu :

1. Minimnya Infrastruktur serta Sarana dan Prasarana.
2. Tata ruang bidang peternakan didaerah tidak diatur secara mendetail.
3. Peran kelembagaan dan SDM petani yang belum optimal.
4. Kurangnya tenaga medis dan paramedis.
5. Kurangnya modal petani, sehingga selalu tergantung dengan bantuan pemerintah.
6. Produksi dan produktifitas peternakan belum optimal.

7. Pakan yang belum memenuhi kualitas dan kuantitas.
8. Rendahnya Mutu produk hasil peternakan.
9. Masih tingginya serangan penyakit hewan menular.

B. BIDANG PERKEBUNAN.



Pembangunan Bidang Perkebunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat meliputi beberapa tanaman perkebunan antara lain : *Karet, Kelapa Sawit, Kelapa dalam, Kopi, Pinang, Lada dan Coklat.*

Dalam pengembangannya sektor perkebunan memiliki permasalahan yang harus diatasi untuk dapat memberikan daya guna yang lebih optimal bagi potensi ekonomi daerah. Pemasalahan yang timbul dan menjadi kendala dalam membangun sektor perkebunan antara lain :

1. Masih rendahnya produktifitas komoditi perkebunan.
2. Rendahnya mutu hasil/olahan yang menyebabkan rendahnya harga tawar menawar akan produk komoditi perkebunan
3. Tingkat sumber daya manusia sebagai pelaku usaha perkebunan dan agroindustri perkebunan yang masih rendah.
4. Ketersediaan teknologi tepat guna yang terbatas dan kurangnya pemanfaatan penggunaan teknologi industri untuk hasil olahan perkebunan.

5. Minimnya sarana dan prasarana serta informasi pasar yang dapat diakses oleh masyarakat perkebunan.
6. Masih tingginya serangan organisme penyakit tanaman dan gangguan usaha perkebunan.

Untuk lebih terperinci dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Di Luar Kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<u>Bidang Peternakan.</u>					
Persentase pertumbuhan dan populasi ternak.	Populasi ternak : - Sapi - Kerbau - kambing - Domba - Unggas	Laju pertumbuhan populasi ternak sebesar 2 % per tahun	a. SDM petugas peternak b. Masih tingginya kematian ternak c. Minimnya sarana dan prasarana d. Kurangnya ketersediaan obat hewan	a. Banyaknya pemotongan betina produktif b. Sulitnya mencari bibit ternak yang berkualitas c. Pencurian ternak masih banyak d. Rendahnya Mutu produk hasil perkebunan dan peternakan	a. Kurangnya tenaga medis dan paramedis b. Kelembagaan dan SDM Peternak c. Regulasi /Tata Ruang bidang peternakan d. Minimnya Infrastruktur dan sarana pelayanan teknis e. Kurangnya akses Peternak untuk mendapatkan modal.
<u>Bidang Perkebunan.</u>					
Produksi Hasil Perkebunan	Produksi Perkebunan : - Kelapa Sawit	Persentase pertumbuhan Produksi Perkebunan	a. SDM Petugas Perkebunan b. Minimnya sarana dan prasarana	a. Pengetahuan petani yg masih rendah dalam penggunaan	a. Masih kurangnya anggaran yg langsung

	<ul style="list-style-type: none"> - Kelapa Dalam - Kopi - Pinang - Karet 		pendukung perkebunan	<p>Teknologi Tepat Guna.</p> <p>b. Kurangnya penggunaan IPTEK.</p>	<p>bersentuhan dengan petani</p> <p>b. Pendidikan dan pelatihan yg berkesinambungan bagi tenaga teknis perkebunan</p>
Mutu Produk hasil perkebunan			<p>Ketersediaan teknologi tepat guna yang terbatas dan kurangnya pemanfaatan penggunaan teknologi industri untuk hasil olahan perkebunan</p>	<p>a. Masih tingginya serangan organisme penyakit tanaman dan gangguan usaha perkebunan.</p> <p>b. Minimnya sarana dan prasarana serta informasi pasar yang dapat diakses oleh masyarakat perkebunan</p> <p>c. Tingkat sumber daya manusia sebagai pelaku usaha perkebunan dan agroindustri perkebunan yang masih rendah</p>	<p>Pengetahuan SDM perkebunan dalam penguasaan Teknologi untuk peningkatan mutu hasil perkebunan</p>

3.2. Telaah Visi dan Misi Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Tahun 2016 -2021.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengacu dan diselaraskan dengan *Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021*.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), maka Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama kurun waktu 2016-2021 telah menetapkan Visi Pembangunan yaitu :

Visi :
***Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas***

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditetapkan **4 (empat) Misi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016-2021** sebagai berikut :

KODE	MISI
MISI 1	Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui pembangunan infrastruktur dasar kawasan ekonomi yang berkualitas
MISI 2	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup
MISI 3	Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan
MISI 4	Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik

Dari misi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 yang terkait dan menjadi tugas dari Dinas Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah pada **Misi Ketiga, yaitu Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat melalui Agroindustri dan Perikanan.**

Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan Visi, Misi tersebut adalah dengan Program dan Kegiatan prioritas pembangunan Bidang Perkebunan dan Peternakan, agar supaya

sector Perkebunan dan Peternakan bisa memberikan manfaat yang lebih bagi masyarakat, sehingga diharapkan sector Perkebunan dan Peternakan bisa menjadi program/kegiatan unggulan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Visi : “ Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas”				
No.	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Misi 3. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat melalui Agro Industri dan Perikanan	Bidang	PETERNAKAN	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan produktivitas sektor pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mendukung kedaulatan pangan (peningkatan kapasitas penyuluh, bantuan alat mesin pertanian dan sarana sarana produksi) 2. Program Peningkatan nilai tukar petani (peningkatan kualitas produksi, fasilitas akses pasar, peningkatan pembangunan jalan produksi, peningkatan keterampilan petani dan pengetahuan petani. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM petugas dan peternak 2. Masih tingginya kematian ternak 3. Minimnya sarana dan prasarana 4. Kurangnya ketersediaan obat hewan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya pemotongan betina produktif 2. Sulitnya mencari bibit ternak yang berstandar SNI 3. Minimnya ketersediaan indukan 4. Rendahnya alokasi anggaran untuk sektor peternakan 5. Ketersediaan pakan yang berkualitas masih rendah 6. Penerapan teknologi pengolahan pakan belum optimal 7. Kurangnya akses Peternak untuk mendapatkan modal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapasitas tampung wilayah untuk ternak masih tinggi 2. Tingkat konsumsi daging setiap tahun cenderung naik 3. Letak Kab. Tanjab Barat berdekatan dengan SIJORI (untuk akses pasar) 4. Kelancaran arus lalu lintas barang dan jasa 5. Sumber daya pakan melimpah 6. Integrasi tanaman dan ternak

<p>3. Peningkatan investasi industri pengolahan dan pemberdayaan petani dalam penguasaan teknologi tepat guna</p> <p>4. Program Peningkatan pelayanan masyarakat veteriner dan kesehatan hewan (misi 2)</p>	<p style="text-align: center;">Bidang</p>	<p style="text-align: center;">PERKEBUNAN</p>	
	<p>a. SDM Petugas Teknis Perkebunan</p> <p>b. Minimnya sarana dan prasarana pendukung perkebunan</p> <p>a. Ketersediaan teknologi tepat guna yang terbatas dan kurangnya pemanfaatan penggunaan teknologi industri untuk hasil olahan perkebunan</p>	<p>a. Masih kurangnya anggaran yg langsung bersentuhan dengan petani</p> <p>b. Kurangnya Pendidikan dan pelatihan yg berkesinambungan bagi tenaga teknis perkebunan</p> <p>c. Pengetahuan SDM perkebunan dalam penguasaan Teknologi untuk peningkatan mutu hasil perkebunan</p> <p>c. Minimnya sarana dan prasarana pendukung perkebunan</p>	<p>a. Kondisi Geografis yg sangat memungkinkan untuk Perkebunan terutama Kelapa Dalam, Kelapa Sawit, Kopi, Pinang, Karet serta pengembangan jenis baru perkebunan seperti kakao</p> <p>b. Keterbukaan akses transportasi darat yg semakin meningkat untuk arus lalu lintas perkebunan.</p> <p>c. Posisi Kab.Tanjung Jabung Barat yg strategis penghubung Provinsi Jambi dengan Selat Malaka dan SIIJORI terutama setelah dibuka Akses melalui Pelabuhan Roro.</p> <p>d. Pertumbuhan Ekonomi Tanjung Jabung Barat yg masih disokong oleh hasil perkebunan rakyat.</p>

3.3. Telaah Renstra Kementerian/Lembaga.

Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 yaitu: **“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”** dengan memperhatikan Visi Pembangunan Nasional tersebut, dengan mempertimbangkan masalah dan tantangan yang dihadapi dalam Pembangunan Pertanian maka Kementerian Pertanian RI menetapkan Visi sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA SISTEM PERTANIAN BIOINDUSTRI BERKELANJUTAN YANG MENGHASILKAN BERAGAM PANGAN SEHAT DAN PRODUK BERNILAI TAMBAH TINGGI BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL UNTUK KEDAULATAN PANGAN DAN KESEJAHTERAAN PETANI”.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut maka Kementerian Pertanian RI menetapkan *Misi* sebagai berikut :

KODE	MISI
MISI 1	Mewujudkan kedaulatan pangan
MISI 2	Mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan
MISI 3	Mewujudkan kesejahteraan petani
MISI 4	Mewujudkan Reformasi Birokrasi.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian maka ditetapkan *Tujuan Pembangunan Pertanian periode 2015 -2019* yang ingin dicapai yaitu :

Tujuan	
T1	Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan
T2	Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan pertanian
T3	Meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi
T4	Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani
T5	Meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional

Untuk mencapai Tujuan Pembangunan Pertanian tersebut maka ditetapkan Sasaran yg merupakan **Indikator Kinerja (IKSS)** Kementerian Pertanian yang ingin dicapai dalam Periode 2015 - 2019 adalah :

1. Swasembada Padi, Jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula.
2. Peningkatan Diversifikasi pangan.
3. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor.

4. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi.
5. Peningkatkan pendapatan keluarga petani
6. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik

Arah kebijakan akan dimplitasikan kedalam Program dan Kegiatan Kementerian Pertanian tahun 2015 - 2019 Sektor Perkebunan dan Peternakan sebagai berikut :

Program	Kegiatan
Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas tanaman Perkebunan Berkelanjutan.	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan Penyegar
	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Semusim
	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan
	Dukungan Pasca Panen dan Pembinaan Usaha
	Dukungan Perlindungan Perkebunan
	Dukungan Pengujian, Pengawasan Mutu Benih dan Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Tekhnis Lainnya Ditjen Perkebunan
Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	Peningkatan Produksi Ternak Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal
	Peningkatan Produksi pakan Ternak Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal
	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosi
	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit Dengan Mengoptimalkan Sumber daya Lokal
	Penjaminan Pangan Asal Hewan yang Aman dan Halal serta pemenuhan Persyaratan Produk Hewan Non Pangan
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Tekhnis Lainnya Ditjen peternakan
Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian	Pengembangan Pengolahan hasil pertanian Bioindustri
	Pengembangan Mutu dan Standarisasi Hasil pertanian
	Pengembangan Usaha dan Investasi

	Pengembangan Pemasaran Internasional
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Tekhnis lainnya pada Ditjen PPHP
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Perluasan areal dan Pengelolaan lahan Pertanian
	Pengelolaan Air Irigasi Untuk pertanian
	Penyaluran Pupuk Bersubsidi
	Pengelolaan Sistem penyediaan dan pengawasan alat dan mesin pertanian
	Pelayanan Pembiayaan Pertanian, Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)
	Dukungan manajemen dan dukungan tekhnis lainnya pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Sumber : Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019

Indikator Kinerja yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian pada Sektor Perkebunan dan Peternakan Tahun 2015-2019 adalah:

Tabel 3.3.
Indikator Kinerja Kementerian Pertanian

No.	Rincian IKU	Baseline 2014	Target					Pertumbuhan (%thn)
			2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula							
	Produksi Padi (juta ton)	70,8	73,1	76,2	78,1	80,1	82,1	3,0
	Produksi Jagung (juta ton)	19,0	20,3	21,4	22,4	23,5	24,7	5,4
	Produksi Kedelai (juta ton)	0,95	1,20	1,82	2,76	2,95	3,00	27,5
	Produksi Gula Tebu (hablur) (juta ton)	2,83	2,97	3,27	3,30	3,66	3,82	7,8
	Produksi Daging Sapi dan kerbau (ribu ton karfak dan ribu ton daging)	460,4	545,3	588,6	639,6	695,0	755,1	10,5
		268,4	436,2	470,9	511,7	556,0	604,0	10,5
2.	Peningkatan diversifikasi pangan							
	Skor Pola Pangan Harapan	81,2	84,1	86,2	88,4	90,5	92,5	3,5
	Konsumsi Kalori (Kkal)	1.987	2.004	2.040	2.077	2.113	2.150	1,8
3.	Peningkatan komoditas bernilai tambah, berydaya sang dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor							
	Pertumbuhan volume ekspor produk pertanian utama (%)	8	10	10	10	10	10	10,0
	Pertumbuhan volume impor produk pertanian utama substitusi impor (%)	7	-5	-5	-1	1	1	-1,0
	Produksi Cabe besar (ribu ton)	1.041	1.082	1.106	1.140	1.174	1.209	3,0
	Produksi Cabe rawit (ribu ton)	735	751	759	770	782	794	1,6
	Produksi Bawang merah (ribu ton)	1.061	1.125	1.173	1.231	1.294	1.360	5,1
	Produksi Mangga (ribu ton)	2.256	2.285	2.344	2.399	2.460	2.519	2,4
	Produksi Nenas (ribu ton)	1.851	1.888	1.926	1.964	2.003	2.042	2,0
	Produksi Manggis (ribu ton)	142	144	147	150	152	155	1,8
	Produksi Salak (ribu ton)	1.038	1.039	1.060	1.102	1.124	1.149	2,0
	Produksi Kentang (ribu ton)	1.296	1.322	1.348	1.375	1.403	1.431	2,0
	Produksi Jeruk Siam (ribu ton)	1.387	1.410	1.438	1.466	1.495	1.513	3,0
	Produksi Karet (Karet kering) (ribu ton)	3.153	3.320	3.438	3.559	3.683	3.810	3,9
	Produksi Kopi (kopi benang) (ribu ton)	685	725	700	751	765	779	2,6
	Produksi Kakao (biji kering) (ribu ton)	709	773	831	872	910	961	6,3
	Produksi Lada (lada kering) (ribu ton)	92	93	94	95	96	97	1,1
	Produksi Pala (biji kering) (ribu ton)	26	28	29	30	32	33	5,1
	Produksi Cengkeh (bunga kering) (ribu ton)	111	113	115	117	119	121	1,9
	Produksi Kelapa (setara kopra) (ribu ton)	3.031	3.309	3.355	3.401	3.446	3.491	2,9
	Produksi Teh (daun kering) (ribu ton)	144	160	160	161	162	163	2,6
4.	Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi							
	Produksi Kelapa Sawit (CPO) (ribu ton)	20.344	20.798	20.845	21.657	24.515	26.420	4,4
	Produksi Ubi kayu (ribu ton)	26,4	26,5	27,1	27,6	28,2	28,8	1,7
5.	Peningkatan pendapatan keluarga petani							
	POB pertanian sempit/TK pertanian (Rp. Juta)	8,0	8,3	8,6	9,0	9,4	9,8	4,3
	Tingkat Kemiskinan di pedesaan (juta orang)	17,1	16,6	16,0	15,5	14,9	14,4	-3,4
6.	Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik							
	Nilai reformasi birokrasi kementerian	65	72	73	74	75	76	
	Opini laporan keuangan kementerian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	

Sumber : Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019

3.4 Telaahan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.

Visi Dinas Perkebunan Propinsi Jambi adalah “**Terwujudnya perkebunan yang tangguh berbasis kerakyatan, berwawasan lingkungan bagi kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan**”.

A. MISI.

Misi Dinas Perkebunan Propinsi Jambi 2016 -2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha perkebunan yang berorientasi pada agribisnis melalui pengembangan komoditi unggulan dan potensial.
2. Meningkatkan penggunaan benih unggul komoditi perkebunan, serta pengawasan peredaran benih dan sarana Input .
3. Meningkatkan kemandirian dalam pengendalian hama dan penyakit tanaman Perkebunan.
4. Meningkatkan kualitas SDM pekebun melalui pelatihan teknis dan pemberdayaan Sistem Kebersamaan Ekonomi (SKE)
5. Meningkatkan Penerapan Teknologi Pengolahan dan Pemasaran hasil perkebunan.
6. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana serta infrastruktur di areal perkebunan rakyat .
7. Meningkatkan koordinasi dalam mengendalikan Gangguang Usaha Perkebunan (GUP) serta kebakaran lahan dan kebun.
8. Menumbuhkan iklim usaha yang kondusif untuk menarik minat investor dalam pengembangan perkebunan

9. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha perkebunan

B. TUJUAN.

Dengan visi dan misi di atas, maka ditetapkan tujuan pembangunan perkebunan Propinsi Jambi adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan sistem pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumber daya lokal.
2. Meningkatkan dan menetapkan swasembada berkelanjutan.
3. Meningkatkan nilai tambah, daya saing dan ekspor produk pertanian.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

C. SASARAN.

Adapun sasaran yang hendak dicapai melalui visi, misi dan tujuan tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan.
2. Investasi usaha perkebunan.
3. Pengembangan dukungan terhadap pengelolaan SDA dan lingkungan hidup.
4. Peningkatan dukungan terhadap pembangunan sistem ketahanan pangan.
5. Pengembangan komoditi.

3.5 Telaahan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi.

Arah kebijakan dan strategi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi tahun 2016-2021 disusun untuk mendukung pencapaian tujuan Pembangunan di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi. Untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan bidang peternakan tahun 2016 -2021 maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Jambi merumuskan Visi “ *Terwujudnya Kemandirian dan Keamanan Pangan Asal Ternak* “ untuk mewujudkan Visi tersebut maka Misi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Jambi sebagai berikut :

1. Mewujudkan ketersediaan Pangan asal ternak
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing ternak serta produk ternak
3. Meningkatkan manajemen pelayanan peternakan dan kesehatan hewan
4. Mengembangkan kebun binatang menjadi sarana pelestarian , edukasi dan rekreasi.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Jambi maka tujuan pembangunan peternakan 2016 -2021 yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatkan populasi , produksi dan produktivitas ternak
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing agribisnis peternakan
3. Mengembangkan sistem informasi untuk mendukung ketersediaan data yang cepat, tepat dan akurat.
5. Meningkatkan koordinasi, fasilitas dan pembinaan lingkungan peternakan
6. Meningkatkan tata kerja peternakan dan kesehatan hewan
7. Meningkatkan konservasi satwa, edukasi dan litbang serta rekreasi

Sasaran merupakan indikator kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Jamb dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sasaran yang ingin dicapai dalam periode 2016 - 2021 adalah ::

1. Meningkatkan populasi , produksi dan produktivitas ternak
2. Meningkatkan nilai tambah produk peternakan dan ketersediaan pangan asal hewan yang Aman, sehat, Utuh dan Halah (ASUH) serta berdaya saing
3. Tersedianya data yang berkualitas untuk mendukung evaluasi dan perumusan kebijakan.
4. Terlaksananya sinergitas pembangunan peternakan dan kesehatan hewan.
5. Terciptanya sistem kerja yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan.
6. Tersedianya sarana dan prasarana konservasi satwa, edukasi dan litbang serta rekreasi.

Arah kebijakan akan dimplitakan kedalam program dan kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi tahun 2016- 2021 untuk menuju Jambi Tuntas sebagai berikut :

1. Program Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan

Implementasi Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

- 1) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Ternak
- 2) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Zoonosis
- 3) Pengamatan Penyakit dan Pengawasan Lalu lintas Hewan

2. Program Peningkatan Produksi Peternakan

Implementasi Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Pembangunan sarana dan prasarana perbibitan Ternak
2. Pengembangan Balai Perbibitan Ternak.
3. Pembangunan Sentra Peternakan Rakyat (SPR).
- 4 . Pengembangan Integrasi Peternakan.
- 5 . Pengembangan Ternak Ruminansia dan Non Ruminansia.
- 6 . Peningkatan Sarana dan Prasarana Peternakan.

3. Program Pengembangan Usaha Peternakan

Implementasi Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

- 1) Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan
- 2) Penguatan Kelembagaan Peternakan
- 3) Permodalan dan Investasi

4. Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Implementasi Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

- 1) Peningkatan Produk Peternakan Yang ASUH
- 2) Pembinaan Unit Usaha Pangan Asal Hewan
- 3) Penerapan Kesrawan dan Perlindungan Masyarakat

5. Program Peningkatan Fungsi Laboratorium Keswan dan Kesmavet

Implementasi Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

- 1) Peningkatan Kapasitas Laboratorium Keswan dan Kesmavet
- 2) Monitoting, Surveilans dan pemeriksaan

6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan

Implementasi Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

- 1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Peternakan
- 2) Monitoring dan Evaluasi
- 3) Statistik Peternakan
- 4) Penata Usahaan Pelaporan Keuangan

7. Program Peningkatan Pelestarian Satwa, Edukasi dan Rekreasi Masyarakat

Implementasi Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

- 1) Pengembangan Kebun Binatang
- 2) Pemeliharaan dan Perawatan Satwa

Berdasarkan telaahan pada subbab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan permasalahan SKPD berdasarkan Sasaran Renstra K/L diterangkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatkan produksi Daging ternak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya tenaga medis dan paramedis 2. Kelembagaan dan SDM Peternak 3. Minimnya Infrastruktur dan sarana pelayanan tekhnis 4. Kurangnya Modal Peternak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beternak masih secara tradisional (usaha sambilan) 2. Sulitnya mencari bibit ternak yang berkualitas 3. Minimnya ketersediaan indukan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapasitas tampung untuk ternak masih tinggi 2. Tingkat konsumsi daging setiap tahun cenderung naik 3. Letak Kab. Tanjab Barat berdekatan dengan SIJORI (untuk akses pasar)
2	Peningkatan Produksi Perkebunan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kopi. 2. Karet 3. Kelapa Dalam 4. Kelapa Sawit (CPO) 	<ol style="list-style-type: none"> a. SDM Petugas Teknis Perkebunan b. Minimnya sarana dan prasarana pendukung perkebunan d. Ketersediaan teknologi tepat guna yang terbatas dan kurangnya pemanfaatan penggunaan teknologi industri untuk hasil olahan perkebunan 	<ol style="list-style-type: none"> a. Masih kurangnya anggaran yg langsung bersentuhan dengan petani b. Kurangnya Pendidikan dan pelatihan yg berkesinambungan bagi tenaga teknis perkebunan c. Pengetahuan SDM perkebunan dalam penguasaan Teknologi untuk peningkatan mutu hasil perkebunan d. Minimnya sarana dan prasarana pendukung perkebunan 	<ol style="list-style-type: none"> a. Kondisi Geografis yg sangat memungkinkan untuk Perkebunan terutama Kelapa Dalam, Kelapa Sawit, Kopi, Pinang, Karet serta pengembangan jenis baru perkebunan seperti kakao. b. Keterbukaan akses transporatsi darat yg semakin meningkat untuk arus lalulintas perkebunan. c. Posisi Kab.Tanjung Jabung Barat yg strategis penghubung Provinsi Jambi dengan Selat Malaka dan SIJORI terutama setelah dibuka Akses melalui Pelabuhan Roro. d. Pertumbuhan Ekonomi Tanjung Jabung Barat yg masih disokong oleh hasil perkebunan rakyat.

3.6 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan Tugas Pembantuan di bidang Perkebunan Peternakan. Sehingga secara khusus ada keterkaitan langsung dengan **Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)** di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Strategi pengembangan dan pemanfaatan potensi Peternakan secara optimal Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (**RTRW**) Kabupaten Tanjung Jabung Barat tercantum dalam Paragraf (2) Kawasan Peruntukan Pertanian Pasal 36 yang berisikan :

- (2) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 huruf b meliputi:
 - a. kawasan pertanian tanaman pangan
 - b. kawasan hortikultura
 - c. kawasan perkebunan dan
 - d. kawasan peternakan
- (3) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. Pengembangan sentra peternakan sapi berada tersebar di Kecamatan Pengabuan, Kecamatan Senyerang, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Muara Papalik, Kecamatan Merlung dan Kecamatan Tebing Tinggi;
 - b. Pengembangan sentra peternakan komoditas unggas berada tersebar di Kecamatan Bram Itam dan

- c. Kawasan pengembangan ternak terintegrasi dengan kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (9)
- (4) Bagian ketiga Perwujudan Rencana Pola Ruang pasal 68.
- (5) Perwujudan kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - (a) Penetapan kawasan sentra peternakan dan penetapan komoditas unggulan;
 - (b) Pengembangan sentra bibit unggul
 - (c) Pengembangan sentra pengolahan pakan ternak
 - (d) Pengembangan pengolahan hasil peternakan
 - (e) Pengembangan pengolahan kotoran ternak
 - (f) Peningkatan produktifitas peternakan dengan komoditas sapi, kerbau, kambing, domba, ayam ras petelur dan ayam ras pedaging dan
 - (g) Peningkatan sarana dan prasarana peternakan
- (6) Bagian Kedua ketentuan Umum Peraturan Zonasi pasal 110 Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dalam pasal 95 ayat (3) huruf b meliputi :
 - a. Kawasan peruntukan tanaman pangan;
 - b. Kawasan peruntukan hortikultura;
 - c. Kawasan peruntukan perkebunan dan
 - d. Kawasan peruntukan peternakan
- (7) Pasal 114 berisikan :
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 110 huruf d memiliki karakter bidang lahan yang digunakan untuk

usaha peternakan yang menyatu dengan pemukiman masyarakat.

- b. Ketentuan zonasi kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang (RTRW) Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
<u>BIDANG PETERNAKAN</u>				
	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Tata ruang untuk kawasan peternakan sapi di Kecamatan Batang Asam, Bram Itam, Ma. Papalik, Merlung dan Tebing Tinggi • Rencana Tata Ruang untuk ternak unggas Kecamatan Bram Itam • Kawasan Integrasi ternak dan perkebunan 	Usaha Peternakan menggunakan lahan kosong dipemukiman atau lahan yang ditanami dengan tanaman pangan maupun perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada regulasi tata ruang untuk peternakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Letak Kab. Tanjab Barat berdekatan dengan SIJORI (untuk akses pasar)
<u>BIDANG PERKEBUNAN</u>				
	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Tata Ruang Integrasi Perkebunan Kelapa Sawit dan Peternakan di Kec.Tungkal Ulu, Merlung, Ma.Papalik, Tebing Tinggi, Batang Asam • Road Map Pengembangan Perkebunan Tanjung Jabung Barat 	Penyediaan Bibit dan Teknologi Tepat Guna serta Tenaga Ahli dalam Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi Anggaran APBD yg Defisit • Kerjasama yg kurang dalam Bentuk Dana CSR dengan Perusahaan yg terdapat pada wilayah kerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi Geografis yg memadai dalam pengembangan jenis perkebunan lainnya • Kondisi Geografis yang strategis penghubung Provinsi Jambi dengan Selat Malaka dan SIJORI yang merupakan Lalu Lintas Perdagangan Internasional. • Terbuka peluang Kerjasama dengan Pemerintah Pusat melalui dana APBN

Tabel 3.6
Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Analisis KHLS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Hasil KHLS Terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
<u>BIDANG PETERNAKAN</u>				
	<ul style="list-style-type: none"> • Digestasi kotoran hewan untuk menghasilkan CH₄ sebagai biogas • Peningkatan penggunaan kotoran hewan untuk pupuk 	a. Kurangnya SDM peternak dalam penggunaan TTG	Kurangnya penyaluran modal peternak	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas tampung untuk ternak masih tinggi • Tingkat konsumsi daging setiap tahun cenderung naik • Letak Kab. Tanjab Barat berdekatan dengan SIJORI (untuk akses pasar)
<u>BIDANG PERKEBUNAN</u>				
	<ul style="list-style-type: none"> • Peluang Pengembangan Desa/Kawasan Sentra Agrobisnis yg mengabungkan Perkebunan dan Peternakan • Penentuan Kawasan Perkebunan Induk 	Kurangnya ketersediaan SDM, sarana dan prasarana pendukung	Pengetahuan Petani dalam memahami pengembangan sector Agrobisnis	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi Kawasan Perkebunan yang cukup baik dalam pembentukan kawasan Agroindustri dan Kawasan Perkebunan Induk

3.7 Penentuan isu Strategis.

Pembangunan Perkebunan dan Peternakan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan salah satu 9 (sembilan) Program Prioritas Pemerintahan Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla atau yang sering disebut dengan Nawacita yaitu mewujudkan **Kemandirian Ekonomi** dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, dimana sektor **Perkebunan dan Peternakan** merupakan bagian integral dari pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan secara prinsipil direncanakan serta disusun sebagai satu kesatuan Perencanaan Pembangunan Nasional, dilakukan secara bersama oleh pemangku kepentingan, diintegrasikan dengan tata ruang wilayah dengan memperhatikan potensi dan prioritas daerah serta dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Sesuai dengan Nawacita Visi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan memilih *kedaulatan pangan asal ternak* pemilihan kedaulatan pangan telah pula mempertimbangkan keselarasan dengan visi kementerian pertanian dan telah sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jederal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan pembangunan bidang peternakan diperlukan langkah-langkah terobosan yang bukan merupakan upaya terpisah dari kebijakan lain atau kebijakan sebelumnya, tetapi merupakan upaya integrasi yang saling memperkuat dalam rangka percepatan pembangunan Perkebunan dan Peternakan terutama untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk perkebunan dan peternakan. Dalam

menjalankan tugas pokok fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga menghadapi Permasalahan antara lain :

1. Minimnya Infrastruktur serta Sarana dan Prasarana
2. Tata ruang bidang perkebunan dan peternakan didaerah tidak diatur secara mendetail
3. Belum adanya regulasi (Perda) di bidang perkebunan dan peternakan
4. Peran kelembagaan dan SDM petani yang belum optimal
5. Kurangnya tenaga medis dan paramedis
6. Kurangnya modal petani, sehingga selalu tergantung dengan bantuan pemerintah
7. Produksi dan produktifitas komoditi perkebunan dan peternakan belum optimal
8. Pakan yang belum memenuhi kualitas dan kuantitas
9. Rendahnya Mutu produk hasil perkebunan dan peternakan
10. Masih tingginya serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan penyakit hewan menular serta gangguan usaha perkebunan.

Berdasarkan permasalahan yang ada dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengidentifikasi *Isu-Isu Strategis* antara lain :

1. Masih tingginya pemotongan betina produktif dan minimnya ketersediaan indukan dan bibit yang berkualitas.
2. Masih rendahnya produksi dan produktifitas komoditi perkebunan dan peternakan.

3. Masih kurangnya SDM petani kebun dan peternak.
4. Masih rendahnya nilai tambah dan daya saing agribisnis perkebunan dan peternakan
5. Masih kurangnya anggaran untuk sektor perkebunan dan peternakan
6. Masih rendahnya tingkat pendapatan petani kebun dan peternak.

Salah satu proses dalam manajemen strategis adalah penilaian lingkungan organisasi melalui proses analisis lingkungan organisasi. Yang dimaksud dengan lingkungan meliputi kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh-pengaruh di dalam dan di sekeliling organisasi yang berdampak pada kehidupan organisasi berupa kekuatan internal, kelemahan internal, peluang eksternal dan tantangan eksternal.

LINGKUNGAN INTERNAL :

A. Kekuatan (*Strengths*)

1. Adanya peraturan, Junis dan Juklak.
2. Luasnya lahan perkebunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Masih tersedianya lahan potensial untuk dikembangkan.
4. Tersedianya sumber dana APBD I, APBD II dan APBN.
5. Tersedianya Peraturan Peundang-undangan perkebunan
6. Adanya perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan

B. Kelemahan (*Wakness*)

1. Masih rendahnya produktifitas komoditi perkebunan dibandingkan produktifitas nasional.

2. Rendahnya mutu hasil/olahan yang menyebabkan rendahnya harga tawar menawar akan produk komoditi perkebunan.
3. Tingkat sumber daya manusia sebagai pelaku usaha perkebunan dan agroindustri perkebunan yang masih rendah.
4. Ketersediaan teknologi tepat guna yang terbatas dan kurangnya pemanfaatan penggunaan teknologi industri untuk hasil olahan perkebunan.
5. Minimnya sarana dan prasarana serta informasi pasar yang dapat diakses oleh masyarakat perkebunan.

LINGKUNGAN EKSTERNAL :

A. Peluang (*Opportunity*)

1. Daerah strategis berada dalam kawasan pertumbuhan ekonomi.
2. Adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah.
3. Tersedianya potensi lahan yang memadai.
4. Terbukanya lapangan kerja dibidang perkebunan.
5. Tumbuhnya investasi tanaman perkebunan dan industry.
6. Pendanaan APBD berorientasi pada kinerja.

B. Tantangan (*Threat*)

1. Tingginya harga saprodi di pasaran.
2. Terbatasnya akses pekebun terhadap sumber permodalan.
3. Perubahan Iklim Global.
4. Rendahnya Nilai jual produk perkebunan.
5. Banyaknya lahan perkebunan yang beralih fungsi.
6. Konflik lahan / lahan tumpang tindih.
7. Adanya hama pengganggu tanaman perkebunan.

3.7.1 Analisis Faktor Lingkungan dan Asumsi.

Berdasarkan dari hasil pencermatan lingkungan strategis dan kondisi sebagaimana diuraikan di atas, untuk mendapatkan urutan prioritasnya perlu dilakukan pembobotan/ rating dan skore (nilai). Proses analisisnya dapat dilihat pada matriks berikut ini.

No.	Lingkungan Strategis	Bobot	Rating	Skore	Kesimpulan (Urutan Prioritas)
A.	Lingkungan Internal				
	<u>Kekuatan (Strengths)</u>				
	1. Adanya peraturan, Junis Dan Juklak.	0,1	3	0,3	IV
	2. Luasnya lahan perkebunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.	0,15	3	0,45	III
	3. Masih tersedianya lahan potensial untuk dikembangkan.	0,2	4	0,8	II
	4. Tersedianya sumber dana APBD I, APBD II dan APBN.	0,25	4	1	I
	5. Tersedianya Peraturan Peundang-undangan perkebunan	0,05	3	0,15	III
	6. Adanya perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan	0,05	3	0,15	II
	<u>Kelemahan (Weakness)</u>				
	1. Masih rendahnya produktifitas komoditi perkebunan dibandingkan produktifitas nasional.	0,10	4	0,4	I
	2. Rendahnya mutu hasil/olahan yang menyebabkan rendahnya harga tawar menawar akan produk komoditi perkebunan.	0,03	3	0,09	II
	3. Tingkat sumber daya manusia sebagai pelaku usaha perkebunan dan agroindustri perkebunan yang masih rendah.	0,03	3	0,09	III
	4. Ketersediaan teknologi tepat guna yang terbatas dan kurangnya pemanfaatan penggunaan teknologi industri untuk hasil olahan perkebunan.	0,01	4	0,04	I
	5. Minimnya sarana dan prasarana serta informasi pasar yang dapat diakses oleh masyarakat perkebunan.	0,01	3	0,03	II

B.	Lingkungan Eksternal				
	<u>Peluang (Opportunity)</u>				
	1. Daerah strategis berada dalam kawasan pertumbuhan ekonomi.	0,05	4	0,2	I
	2. Adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah.	0,05	3	0,15	III
	3. Tersedianya potensi lahan yang memadai.	0,10	4	0,4	II
	4. Terbukanya lapangan kerja dibidang perkebunan.	0,02	3	0,06	III
	5. Tumbuhnya investasi tanaman perkebunan dan industry.	0,15	2	0,3	IV
	6. Pendanaan APBD berorientasi pada kinerja.	0,1	3	0,3	II
	<u>Tantangan (Threat)</u>				
	1. Tingginya harga saprodi di pasaran.	0,02	3	0,06	II
	2. Terbatasnya akses pekebun terhadap sumber permodalan.	0,2	3	0,6	III
	3. Perubahan Iklim Global.				
	4. Rendahnya Nilai jual produk perkebunan.	0,03 0,03	2 3	0,06 0,09	IV I
	5. Banyaknya lahan perkebunan yang beralih fungsi.	0,05	4	0,2	II
	6. Konflik lahan / lahan tumpang tindih.	0,10	4	0,4	II
7. Adanya hama pengganggu tanaman perkebunan.	0,10	3	0,3	III	

Selanjutnya, dari hasil kajian terhadap faktor-faktor lingkungan serta dampaknya terhadap masa depan organisasi Dinas perkebunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta pengaruhnya terhadap kemitraan organisasi, dapat disimpulkan asumsi strategi sebagai berikut :

Asumsi Strategis SO (Kekuatan vs Peluang).

1. Optimalkan penggunaan lahan potensil yang bisa dikembangkan menjadi lahan dengan komoditi perkebunan.
2. Manfaatkan lahan dan peluang yang ada dengan meningkatkan produksi komoditas perkebunan yang memiliki keunggulan spesifik.
3. Dayagunakan peraturan, juknis dan juklak yang ada untuk mendukung pelaksanaan UU Otonomi daerah.
4. Optimalkan penggunaan dana yang tersedia untuk mendukung kinerja SDM.
5. Manfaatkan lahan dan peluang yang ada untuk mendukung pembangunan industry di daerah sentra perkebunan.

Asumsi Strategis WO (Kelemahan vs Peluang).

1. Tingkatkan kemampuan SDM bidang perkebunan dan penambahan jumlah pegawai dengan kemampuan teknis di bidang perkebunan.
2. Tingkatkan pemanfaatan lahan untuk meningkatkan hasil produksi perkebunan.
3. Tingkatkan produksi dan produktivitas perkebunan untuk meningkatkan investasi dan industri tanaman perkebunan.
4. Tingkatkan sarana dan prasarana serta informasi pasar sehingga mudah diakses oleh pekebun.
5. Manfaatkan komitmen dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan teknologi tepat guna di bidang perkebunan.

Asumsi strategis ST (Kekuatan vs Tantangan).

1. Tingkatkan sarana dan prasarana untuk memudahkan akses pekebun dengan kelembagaan dan sumber permodalan.
2. Gunakan peraturan, juknis dan juklak yang ada untuk mencegah beralih fungsi lahan perkebunan.
3. Gunakan sumber dana yang ada untuk mengatasi hama pengganggu tanaman perkebunan.
4. Gunakan peraturan perundang-undangan untuk mengatasi konflik lahan/ lahan tumpang tindih.

Asumsi strategis WT (Kelemahan vs Tantangan).

1. Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM dan kelembagaan untuk mengawasi peredaran saprodi perkebunan di pasaran.
2. Tingkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk memudahkan akses pekebun terhadap sumber permodalan.
3. Tingkatkan mutu hasil/ olahan dengan penggunaan teknologi tepat guna untuk meningkatkan nilai jual produk perkebunan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada telaah strategis dengan menggunakan instrumen matriks analisis S.W.O.T sebagaimana terlihat pada Matriks 2 berikut ini;

<p style="text-align: center;">KAFE</p> <p style="text-align: center;">KAFI</p>	<p><u>Kekuatan</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Adanya peraturan, Junis Dan Juklak.2. Luasnya lahan perkebunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.3. Masih tersedianya lahan potensial untuk dikembangkan.4. Tersedianya sumber dana APBD I, APBD II dan APBN.5. Tersedianya Peraturan Peundang-undangan perkebunan6. Adanya perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan	<p><u>Kelemahan</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Masih rendahnya produktifitas komoditi perkebunan dibandingkan produktifitas nasional.2. Rendahnya mutu hasil/olahan yang menyebabkan rendahnya harga tawar menawar akan produk komoditi perkebunan.3. Tingkat sumber daya manusia sebagai pelaku usaha perkebunan dan agroindustri perkebunan yang masih rendah.4. Ketersediaan teknologi tepat guna yang terbatas dan kurangnya pemanfaatan penggunaan teknologi industri untuk hasil olahan perkebunan.5. Minimnya sarana dan prasarana serta informasi pasar yang dapat diakses oleh masyarakat perkebunan.
---	--	--

Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2016-2021

<p><u>Peluang</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah strategis berada dalam kawasan pertumbuhan ekonomi. 2. Adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah. 3. Tersedianya potensi lahan yang memadai. 4. Terbukanya lapangan kerja dibidang perkebunan. 5. Tumbuhnya investasi tanaman perkebunan dan industry. 6. Pendanaan APBD berorientasi pada kinerja. 	<p><u>Asumsi strategis S-O</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalkan penggunaan lahan potensil yang bisa dikembangkan menjadi lahan dengan komoditi perkebunan. 2. Manfaatkan lahan dan peluang yang ada dengan meningkatkan produksi komoditas perkebunan yang memiliki keunggulan spesifik. 3. Dayagunakan peraturan, juknis dan juklak yang ada untuk mendukung pelaksanaan UU Otonomi daerah. 4. Optimalkan penggunaan dana yang tersedia untuk mendukung kinerja SDM. 5. Manfaatkan lahan dan peluang yang ada untuk mendukung pembangunan industri di daerah sentra perkebunan. 	<p><u>Asumsi strategis W-O</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkatkan kemampuan SDM bidang perkebunan dan penambahan jumlah pegawai dengan kemampuan teknis di bidang perkebunan. 2. Tingkatkan pemanfaatan lahan untuk meningkatkan hasil produksi perkebunan. 3. Tingkatkan produksi dan produktivitas perkebunan untuk meningkatkan investasi dan industri tanaman perkebunan. 4. Tingkatkan sarana dan prasarana serta informasi pasar sehingga mudah diakses oleh pekebun. 5. Manfaatkan komitmen yang pemerinyah daerah untuk meningkatkan teknologi tepat guna di bidang perkebunan.
<p><u>Tantangan</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya harga saprodi di pasaran. 2. Terbatasnya akses pekebun terhadap sumber permodalan. 3. Perubahan Iklim Global. 4. Rendahnya Nilai jual produk perkebunan. 5. Banyaknya lahan perkebunan yang beralih fungsi. 6. Konflik lahan / lahan tumpang tindih. 7. Adanya hama pengganggu tanaman perkebunan. 	<p><u>Asumsi strategis S-T</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkatkan sarana dan prasarana untuk memudahkan akses pekebun dengan kelembagaan dan sumber permodalan. 2. Gunakan peraturan, juknis dan juklak yang ada untuk mencegah beralih fungsi lahan perkebunan. 3. Gunakan sumber dana yang ada untuk mengatasi hama pengganggu tanaman perkebunan. 4. Gunakan peraturan perundang-undangan untuk mengatasi konflik lahan/ lahan tumpang tindih. 	<p><u>Asumsi strategis W-T</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM dan kelembagaan untuk mengawasi peredaran saprodi perkebunan di pasaran. 2. Tingkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk memudahkan akses pekebun terhadap sumber permodalan. 3. Tingkatkan mutu hasil/ olahan dengan penggunaan teknologi tepat guna untuk meningkatkan nilai jual produk perkebunan.

3.7.2 Analisis Strategis dan Asumsi Pilihan.

Untuk sampai pada rumusan faktor kunci keberhasilan, perlu dilakukan langkah-langkah telaahan strategis lebih lanjut. Dalam hal ini analisis strategis dikaitkan dengan visi, misi dan nilai-nilai luhur organisasi Dinas Perkebunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga akan diperoleh urutan ASAP. Telaahan strategis ini dilakukan dengan instrumen matriks penetapan ASAP sebagaimana tertera pada Matriks 3 berikut ini :

Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2016-2021

No.	Asumsi Strategis	Visi	Keterkaitan Misi				Nilai	Jumlah	Urutan
			1	2	3	4			
1.	<u>Asumsi strategis S-O</u>								
	1. Optimalkan penggunaan lahan potensil yang bisa dikembangkan menjadi lahan dengan komoditi perkebunan.	4	4	3	3	2	4	20	5
	1. Manfaatkan lahan dan peluang yang ada dengan meningkatkan produksi komoditas perkebunan yang memiliki keunggulan spesifik.	4	3	3	2	2	5	19	6
	3. Dayagunakan peraturan, juknis dan juklak yang ada untuk mendukung pelaksanaan UU Otonomi daerah.	3	2	2	3	2	3	15	16
	1. Optimalkan penggunaan dana yang tersedia untuk mendukung kinerja SDM.	3	2	3	4	2	4	18	9
5. Manfaatkan lahan dan peluang yang ada untuk mendukung pembangunan industry d daerah sentra perkebunan.	4	3	3	2	2	4	18	7	
2.	<u>Asumsi strategis W-O</u>								
	1. Tingkatkan kemampuan SDM bidang perkebunan dan penambahan jumlah pegawai dengan kemampuan teknis di bidang perkebunan.	4	3	3	4	2	5	21	1
	2. Tingkatkan pemanfaatan lahan untuk meningkatkan hasil produksi perkebunan.	3	4	3	2	2	4	18	8
	3. Tingkatkan produksi dan produktivitas perkebunan untuk meningkatkan investasi dan industri tanaman perkebunan.	4	4	3	3	2	5	21	2
	4. Tingkatkan sarana dan prasarana serta informasi pasar sehingga mudah diakses oleh pekebun.	3	2	3	2	4	4	18	10
5. Manfaatkan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan teknologi tepat guna di bidang perkebunan.	3	2	2	3	2	4	16	11	

Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2016-2021

	<u>Asumsi strategis S-T</u>								
3	1. Tingkatkan sarana dan prasarana untuk memudahkan akses pekebun dengan kelembagaan dan sumber permodalan.	3	2	2	2	4	4	17	13
	2. Gunakan peraturan, juknis dan juklak yang ada untuk mencegah beralih fungsi lahan perkebunan.	4	2	2	2	2	3	15	17
	3. Gunakan sumber dana yang ada untuk mengatasi hama pengganggu tanaman perkebunan.	3	2	2	2	2	4	15	15
	4. Gunakan peraturan perundang-undangan untuk mengatasi konflik lahan/ lahan tumpang tindih.	3	3	2	2	2	5	17	14
	<u>Asumsi strategis W-T</u>								
4	1. Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM dan kelembagaan untuk mengawasi peredaran saprodi perkebunan di pasaran.	4	3	3	4	3	3	20	3
	2. Tingkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk memudahkan akses pekebun terhadap sumber permodalan.	3	2	3	2	4	4	18	12
	3. Tingkatkan mutu hasil/ olahan dengan penggunaan teknologi tepat guna untuk meningkatkan nilai jual produk perkebunan.	4	3	4	3	2	4	20	4

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan pertanian yaitu mewujudkan sistem Bioindustri yang berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi berbasis sumber daya lokal untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani serta melihat potensi wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai Dinas Teknis yang berkepentingan membangun Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Bidang Perkebunan dan Peternakan sesuai tugas pokok dan fungsinya mempunyai **Visi Pembangunan** adalah :

**“ TERWUJUDNYA PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
BERKELANJUTAN, BERDAYA SAING DAN BERKULAITAS
MENUJU KETESEDIAAN PANGAN DAN KESEJAHTERAAN
PETANI”**

Mengandung Makna bahwa : “Mewujudkan pembangunan Perkebunan dan Peternakan dalam suatu penataan wilayah yang berwawasan lingkungan melalui pengintegrasian kegiatan *produksi, pengolahan, distribusi* kegiatan *On Farm* dan *Off Farm* dalam suatu **Sistim Manajemen** dengan menciptakan *Produk-Produk Ungulan* Perkebunan dan Peternakan yang memiliki daya saing dan berkualitas sehingga mampu meningkatkan ketersediaan pangan, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat”.

4.2 Misi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab.Tanjung Jabung Barat.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan **Visi Pembangunan Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016 - 2021** tersebut, maka ditetapkan 3 Misi yang diemban **Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat** adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Misi Dinas Perkebunan dan Peternakan.

Kode	MISI
M.1	Meningkatkan Produksi dan Produktivitas komoditi Perkebunan dan Peternakan dalam rangka memenuhi ketersediaan pangan sekaligus untuk meningkatkan pendapatan Petani dan Peternak serta kesejahteraan masyarakat.
M.2	Memfaatkan dan mengoptimalkan IPTEK yang ramah lingkungan serta memberikan nilai tambah bagi Petani dan Peternak, sekaligus mendukung peningkatan Kualitas Produk Perkebunan dan Peternakan serta pengembangan Sumber Energi.
M.3	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pembangunan Perkebunan dan Peternakan.

4.3 Tujuan dan Sasaran Strategis Jangka Menengah Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab.Tanjung Jabung Barat.

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan. Berdasarkan pernyataan Visi dan Misi Dinas ditetapkanlah **Tujuan Strategis (TS) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat** sebagai berikut :

Tabel 4.2 Tujuan Strategis (TS) Dinas Perkebunan dan Peternakan.

Kode	Tujuan Strategis (TS)
T.1	Meningkatkan Populasi dan Produksi komoditi Perkebunan dan Ternak.
T.2	Mengurangi angka kematian dan kesakitan ternak dan meningkatkan mutu hasil Perkebunan dengan memanfaatkan IPTEK.
T.3	Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya Perkebunan dan Peternakan secara optimal dan berkelanjutan.

T.4 Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana pembangunan Perkebunan dan Peternakan.

Untuk mengukur tingkat ketercapaian **Tujuan Strategis (TS)** Pembangunan Perkebunan dan Peternakan diperlukan beberapa **Sasaran Strategis (SS)** yg menggambarkan kondisi yg dicapai pada tahun 2021. Selanjutnya ditetapkan **Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)** untuk mengukur apakah **Sasaran Strategis (SS)** dapat mengkonfirmasi **Tujuan Strategis (TS)** yg akan dicapai pada masa mendatang (Tahun 2021).

Sasaran Strategis (SS) untuk tingkat ketercapaian masing-masing tujuan adalah sebagai berikut :

1. **Tujuan Strategis 1 (T.1)**, “Meningkatkan Populasi dan Produksi komoditi Perkebunan dan Peternakan”, ditandai dengan tercapainya **Sasaran Strategis (SS)** sebagai berikut :

Tabel 4.3 Tujuan Strategis 1 (T.1)

Kode	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)										
SS1	Meningkatnya Produksi Daging Ternak.	Produksi Daging Ternak (kg) :										
		<table> <tr><td>Daging Sapi</td><td>378.567 kg</td></tr> <tr><td>Daging Kerbau</td><td>13.903 kg</td></tr> <tr><td>Daging Kambing</td><td>60.469 kg</td></tr> <tr><td>Daging Domba</td><td>608 kg</td></tr> <tr><td>Daging Unggas</td><td>2.524.952 kg</td></tr> <tr><td>Kelahiran Ternak Sapi IB</td><td>1.500 Ekor</td></tr> </table>	Daging Sapi	378.567 kg	Daging Kerbau	13.903 kg	Daging Kambing	60.469 kg	Daging Domba	608 kg	Daging Unggas	2.524.952 kg
Daging Sapi	378.567 kg											
Daging Kerbau	13.903 kg											
Daging Kambing	60.469 kg											
Daging Domba	608 kg											
Daging Unggas	2.524.952 kg											
Kelahiran Ternak Sapi IB	1.500 Ekor											
SS2	Meningkatnya Populasi Ternak	Populasi Ternak (ekor) :										
		<table> <tr><td>Sapi</td><td>8.096 ekor</td></tr> <tr><td>Kerbau</td><td>646 ekor</td></tr> <tr><td>Kambing</td><td>40.435 ekor</td></tr> <tr><td>Domba</td><td>670 ekor</td></tr> <tr><td>Unggas</td><td>1.335.957 ekor</td></tr> </table>	Sapi	8.096 ekor	Kerbau	646 ekor	Kambing	40.435 ekor	Domba	670 ekor	Unggas	1.335.957 ekor
Sapi	8.096 ekor											
Kerbau	646 ekor											
Kambing	40.435 ekor											
Domba	670 ekor											
Unggas	1.335.957 ekor											
SS3	Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan.	Produksi Komoditi Perkebunan (ton) :										
		<table> <tr><td>Sawit</td><td>147.790 ton</td></tr> <tr><td>Karet</td><td>15.863 ton</td></tr> <tr><td>Kelapa</td><td>61.635 ton</td></tr> <tr><td>Kopi</td><td>1.367 ton</td></tr> <tr><td>Pinang</td><td>12.375 ton</td></tr> </table>	Sawit	147.790 ton	Karet	15.863 ton	Kelapa	61.635 ton	Kopi	1.367 ton	Pinang	12.375 ton
Sawit	147.790 ton											
Karet	15.863 ton											
Kelapa	61.635 ton											
Kopi	1.367 ton											
Pinang	12.375 ton											

2. **Tujuan Strategis 2 (T.2),**” Mengurangi angka kematian dan kesakitan ternak dan meningkatkan Mutu Hasil Perkebunan dengan memanfaatkan IPTEK”, ditandai dengan tercapainya **Sasaran Strategis (SS)** sebagai berikut :

Tabel 4.4 Tujuan Strategis 2 (T.2)

Kode	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS4	Menurunnya Angka Kematian Ternak.	Persentase Kematian Ternak minimal 1.5 %
SS5	Meningkatnya Mutu Hasil Perkebunan dengan Memanfaatkan IPTEK	Pengembangan Agrobisnis Sektor Perkebunan : 1 sentra agrobisnis
		Penerapan IPTEK Budidaya dan Pascapanen tanaman perkebunan : 6 kelompok tani
		Tersedianya Blok Penghasil Tinggi : 3 Komiditi

3. **Tujuan Strategis 3 (T.3),**”Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Perkebunan dan Peternakan secara optimal dan berkelanjutan”, ditandai dengan tercapainya **Sasaran Strategis (SS)** :

Tabel 4.5 Tujuan Strategis 3 (T.3)

Kode	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	
SS6	Meningkatnya pengelolaan Lahan Produktif	Bertambahnya Luas Lahan Perkebunan (Ha) :	
		Luas Lahan Sawit	56.294 Ha
		Luas Lahan Karet	15.806 Ha
		Luas Lahan Kelapa	56.294 Ha
		Luas Lahan Kopi	3.310 Ha
		Luas Lahan Pinang	11.800 Ha
SS7	Meningkatnya SDM Pelaku Usaha Perkebunan dan Penguatan serta Pengembangan Kelembagaan.	Jumlah Petani Perkebunan yg mengikuti Pelatihan Sistem Kebersamaan Ekonomi (SKE): 60 kelompok Tani	
		Penguatan Kelembagaan kelompok Petani : 30 Asosiasi	
		Jumlah STD-B yg dimiliki Petani Perkebunan : 6.000 STD-B Agrobisnis.	
		Jumlah Kelompok Peternak yg menerapkan Teknologi Peternakan : 9 kelompok	

4. **Tujuan Strategis 4 (T.4),**” Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana pembangunan Perkebunan ”, ditandai dengan tercapainya **Sasaran Strategis (SS)** sebagai berikut :

Tabel 4.6 Tujuan Strategis 4 (T.4)

Kode	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS8	Meningkatnya sarana dan prasarana Pembangunan Perkebunan dan Peternakan	Terbangunnya Jalan Produksi Perkebunan : 40 km
		Jumlah Kelompok Tani yg menggunakan Peralatan untuk Budidaya dan Pasca Panen : 36 Kelompok

Secara Implisit dari penjelasan diatas dapat kita tarik kesimpulan yg lebih rinci mengenai **Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD** dihitung/Estimasi dan direncanakan pertahun sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 4.7
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2016-2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Pada Tahun Ke -					
					1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatkan populasi dan produksi Komoditi Perkebunan dan peternakan (T.1)	Meningkatnya produksi daging ternak (SS1)	Jumlah Produksi Daging sapi	Kg	342.879	349.737	356.732	363.867	371.144	378.567
			Jumlah Produksi Daging Kerbau	Kg	12.952	12.844	13.101	13.363	13.630	13.903
			Jumlah Produksi Daging Kambing	Kg	54.769	55.864	56.981	58.121	59.283	60.469
			Jumlah Produksi Daging Domba	Kg	551	562	573	584	596	608
			Jumlah Produksi daging unggas	Kg	2.286.241	2.331.966	2.378.600	2.426.179	2.475.444	2.524.952
			Jumlah kelahiran ternak sapi IB	Ekor	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
			Meningkat nya populasi ternak (SS2)	Populasi Sapi	Ekor	7.336	7.482	7.631	7.783	7.938
		Populasi Kerbau		Ekor	613	619	625	632	639	646
		Populasi Kambing		Ekor	40.235	40.275	40.315	40.355	40.395	40.435
		Populasi Domba		Ekor	640	646	652	658	664	670
		Populasi Unggas		Ekor	1.046.758	1.099.095	1.054.050	1.211.753	1.272.340	1.335.957
		Meningkatnya Produksi Komiditi Perkebunan (SS3)	Jumlah Produksi Sawit	Ton	133.858	136.535	139.267	142.051	144.893	147.790
			Jumlah Produksi Karet	Ton	14.367	14.655	14.948	15.247	15.552	15.863
			Jumlah Produksi Kelapa	Ton	55.824	56.941	58.080	59.241	60.426	61.635
			Jumlah Produksi Kopi	Ton	1.238	1.263	1.288	1.314	1.340	1.367
Jumlah Produksi pinang	Ton		11.208	11.432	11.662	11.895	12.133	12.375		
2.	Mengurangi angka kematian dan kesakitan ternak dan meningkatkan Mutu Hasil Perkebunan dengan memanfaatkan IPTEK (T.2)	Menurunnya angka kematian ternak (SS4)	Persentase Kematian Ternak	%	2 %	1,9 %	1,8 %	1,7 %	1,6 %	1,5 %
			Meningkatnya Mutu Hasil Perkebunan dengan Memamfaatkan IPTEK (SS5)	Pengembangan Agrobisnis Sektor Perkebunan	Sentra Agrobisnis	1	1	1	1	1
		Penerapan IPTEK Budidaya dan Pascapanen tanaman perkebunan		Kelompok Tani	6	6	6	6	6	6

Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2016-2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Pada Tahun Ke -					
					1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
.			Tersedianya Blok Penghasil Tinggi	Komiditi	3	3	3	3	3	3
3	Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Perkebunan dan Peternakan secara optimal dan berkelanjutan (T.3)	Meningkatnya pengelolaan Lahan Produktif (SS6)	Bertambahnya Luas Lahan Perkebunan :	Ha	62.889	63.833	64.790	65.762	66.749	67.750
			Luas Lahan Sawit	Ha	14.806	15.006	15.206	15.406	15.606	15.806
			Luas Lahan Karet	Ha	54.908	55.183	55.458	55.736	56.014	56.294
			Luas Lahan Kelapa	Ha	3.073	3.119	3.166	3.213	3.262	3.310
			Luas Lahan Kopi	Ha	10.030	10.484	10.798	11.122	11.456	11.800
			Luas Lahan pinang	Ha						
		Meningkatnya SDM Pelaku Usaha Perkebunan dan Penguatan serta Pengembangan Kelembagaan (SS7)	Jumlah Petani Perkebunan yg mengikuti Pelatihan Sistem Kebersamaan Ekonomi (SKE)	Kelompok Tani	10	10	10	10	10	10
			Penguatan Kelembagaan kelompok Petani	Asosiasi	5	5	5	5	5	5
			Jumlah STD-B yg dimiliki Petani Perkebunan	STD-B	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			Jumlah Kelompok Peternak yg menerapkan Teknologi Peternakan	Kelompok	-	5	6	7	8	9
4	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana pembangunan Perkebunan dan Peternakan (T.4)	Meningkatnya sarana dan prasarana Pembangunan Perkebunan dan Perkebunan (SS8)	Terbangunnya Jalan Produksi Perkebunan	Km	-	-	-	10	10	10
			Jumlah Kelompok Tani yg menggunakan Peralatan untuk Budidaya dan Pasca Panen	Kelompok	6	6	6	6	6	6

a. **Strategi dan Kebijakan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.**

Rumusan **Strategi** merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana Tujuan dan Sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian Kebijakan. **Kebijakan** adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan Strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran. Berikut Strategi dan Kebijakan yang dirumuskan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu :

S t r a t e g i

1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas komoditi Perkebunan melalui *Intensifikasi, Extensifikasi* dan *Diversifikasi*.
2. Peningkatan Populasi, Produksi dan Produktivitas ternak melalui *Gerakan Serentak Birahi dan Inseminasi Buatan (GBIB)*, Pemetaan kawasan peternakan, integrasi ternak dengan tanaman, pemanfaatan bahan pakan lokal dan pemberdayaan peternak, serta memperbesar peran dan tanggung jawab swasta.
3. Penguatan kelembagaan dan pemberdayaan petani.
4. Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular dan gangguan reproduksi dengan melaksanakan pengobatan, dan vaksinasi ternak serta mempertahankan dan memperluas status wilayah bebas penyakit hewan menular strategis.
5. Peningkatan penerapan teknologi tepat guna bagi pengembangan peternakan melalui **UPPO, Rumah Kompos, Biogas** dan lain lain.
6. Pengembangan *Sentra Agribisnis* di kawasan Sentra Perkebunan dan Peternakan.

7. Meningkatkan infrastruktur serta sarana dan prasarana perkebunan dan peternakan.

K e b i j a k a n.

Kebijakan merupakan arah tindakan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah, dalam hal ini Dinas Perkebunan dan Perternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kebijakan Dinas Perkebunan dan Peternakan selaras dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten bahkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat. *Kebijakan Umum* Kepala Dinas yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peningkatan produksi dan produktifitas komoditi perkebunan melalui peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi dengan penyediaan bibit yang bermutu, pengendalian OPT, serta pengawasan peredaran Bibit, pupuk dan Pestisida.
2. Mewujudkan Pengembangan agribisnis dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung peningkatan populasi, produksi dan produktivitas ternak.
3. Peningkatan pelayanan kesehatan hewan melalui peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana keswan, obat-obatan, medis dan paramedis.
4. Peningkatan Pengelolaan sumberdaya Peternakan yang optimal dan berkelanjutan.

Untuk dapat melihat relevansi dan konsistensi antar pernyataan **Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Kebijakan**, dapat dilihat pada **Tabel 4.8** berikut ini:

Tabel 4.8
Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, Strategi dan Kebijakan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021

VISI : “ TERWUJUDNYA PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN BERKELANJUTAN, BERDAYA SAING DAN BERKUALITAS MENUJU KETESEDIAAN PANGAN DAN KESEJAHTERAAN PETANI”			
MISI I: “Meningkatkan Produksi dan Produktivitas komoditi Perkebunan dan Peternakan dalam rangka memenuhi ketersediaan pangan sekaligus untuk meningkatkan pendapatan petani dan kesejahteraan masyarakat”.			
Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan populasi dan produksi Komoditi Perkebunan dan peternakan (T.1)	Meningkatnya produksi daging ternak (SS1)	1. Peningkatan populasi, produksi dan produktivitas ternak melalui Gerakan Serentak Birahi (Gertak Birahi) melalui Kawin Suntik (IB), pemetaan perwilayahan, Integrasi Ternak dengan Sawit, Pemanfaatan Bahan pakan Lokal dan pemberdayaan peternak serta memperbesar peran dan tanggung jawab swasta.	Pengembangan agribisnis dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peternakan guna mendukung peningkatan produksi peternakan.
	Meningkat nya populasi ternak (SS2)		
	Meningkatnya Produksi Komiditi Perkebunan (SS3)	1. Tingkatkan hasil produksi dan Produktifitas Hasil Perkebunan. 2. Meminimalisir serangan Hama Penyakit Tanaman.	1. Mewujudkan peningkatan hasil produksi melalui Intensifikasi, Diversifikasi, Ekstensifikasi dengan penyediaan bibit yg bermutu. 2. Pengendalian OPT serta pengawasan peredaran Pupuk, Bibit dan Pestisida.
MISI II: “Memanfaatkan dan mengoptimalkan IPTEK yang ramah lingkungan serta memberikan nilai tambah bagi Petani dan Peternak, sekaligus mendukung peningkatan Kualitas Produk Perkebunan dan Peternakan serta pengembangan Sumber Energi”.			
Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Strategi	Kebijakan
Mengurangi angka kematian dan kesakitan ternak dan meningkatkan Mutu Hasil Perkebunan dengan memanfaatkan IPTEK (T.2)	Menurunnya angka kematian ternak (SS4)	Pengendalian dan penanggulangan penyakit menular dan gangguan reproduksi dengan melaksanakan pengobatan, vaksinasi ternak serta mempertahankan dan memperluas status wilayah bebas penyakit menular strategis (PHMS).	Peningkatan pelayanan keswan melalui peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana keswan, obat-obatan, medis dan paramedis.

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Strategi	Kebijakan
	Meningkatnya Mutu Hasil Perkebunan dengan Memamfaatkan IPTEK (SS5)	Meningkatkan Penggunaan Teknologi Terapan pada pelaksanaan Pengolahan, Pemeliharaan dan Pasca Panen bagi Petani Perorangan/Kelompok.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan sosialisasi dan konsultasi teknis yg lebih intens untuk petani perorangan/kelompok melalui tenaga PPL. 2. Memberi bantuan hibah langsung kepada masyarakat berupa bibit unggul, Pupuk, alat pengolahan pascapanen. 3. Membangun dan memelihara sarana pendukung dan penunjang perkebunan.
Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Perkebunan dan Peternakan secara optimal dan berkelanjutan (T.3)	Meningkatnya pengelolaan Lahan Produktif (SS6)	Meningkatkan pengelolaan lahan produktif dengan pengembangan tanaman penyegar tahunan	<ol style="list-style-type: none"> (1) Penyediaan bantuan bibit dan sarana produksi lainnya yg merupakan penunjang pengolahan perkebunan (2) Pendampingan oleh tenaga teknis lapangan
	Meningkatnya SDM Pelaku Usaha Perkebunan dan Penguatan serta Pengembangan Kelembagaan (SS7)	<ol style="list-style-type: none"> (1) Pelatihan secara berkesinambungan bagi petani dalam pengolahan lahan sebelum masa tanam dan pasca panen (2) Pendampingan secara berkala dan terstruktur 	<ol style="list-style-type: none"> (1) Mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi petani (2) Memberdsayakan PPL dalam pendampingan bagi petani
Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana pembangunan Perkebunan dan Peternakan (T.4)	Meningkatnya sarana dan prasarana Pembangunan Perkebunan dan Perkebunan (SS8)	<ol style="list-style-type: none"> (1) Meningkatkan penggunaan TTG (2) Budidaya penggunaan IPTEK untuk pengolahan pasca panen (3) Peningkatan Sarana dan Prasarana untuk peningkatan Produksi komoditi perkebunan dan ternak 	<ol style="list-style-type: none"> (1) Mengadakan bantuan bibit tanaman unggul dan ternak unggul bagi petani (2) Mengadakan bantuan sarana penunjang pengolahan dan pasca panen bagi petani (3) Mengadakan vaksin dan obata-obatan bagi peternak. (4) Pembangunan dan Rehabilitasi/Perbaikan Jalan Produksi

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Program dan Kegiatan.

Arah kebijakan dan strategi *Dinas Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016-2021* yang telah diuraikan tersebut akan diimplementasikan kedalam Program dan Kegiatan dimana program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasi oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Program adalah rangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis berdasarkan isu-isu strategis sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Penyusunan program pembangunan perkebunan dan peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan terus berlanjut dan diprioritaskan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Program menjadi instrumen untuk menentukan sasaran yang diproyeksikan dengan memanfaatkan sumber daya dan sumber dana tertentu. Program pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 5.1
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perkebunan dan Peternakan
Tahun 2016-2021

Urusan Pilihan

Kode		Uraian
Program	Kegiatan	
01		Program pelayanan Administrasi Perkantoran
	01	Penyediaan jasa surat menyurat
	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan
	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor
	10	Penyediaan alat tulis kantor
	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
	13	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
	17	Penyediaan makanan dan minuman
	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
	19	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	xx	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
	xx	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
	13	Pengadaan peralatan gedung kantor
	22	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
	26	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor

	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor - Pembangunan Rumah Genset - Pembangunan Tower Air - Pemeliharaan rutin gedung kantor
03	02	Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
05	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengembangan SDM

Urusan Pertanian

Kode		Uraian
Program	Kegiatan	
17	18	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Promosi atas hasil produksi perkebunan dan peternakan
18	43 xx 45	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan pengembangan sentra perkebunan komoditi unggulan Magang/Pelatihan Pengolahan Komoditi Perkebunan Pengadaan Prasarana dan Sarana Perkebunan
19	30 31 32 33 34	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Pengembangan Jaringan Irigasi Lahan Perkebunan (TAM) Pemeliharaan Lanjutan Kebun Percontohan Kopi Libtukom Intensifikasi Kebun Kopi Rakyat Pemeliharaan Blok Penghasil Tinggi (BPT) Kelapa, Pinang dan Kopi Libtukom Pembibitan Kelapa Sawit

	35	Pencegahan, Pengendalian Kebakaran Lahan, Kebun dan Konflik Lahan Perkebunan
	36	Peningkatan, Pembinaan, Pengawasan Pupuk dan Pestisida
	37	Pembinaan Lintas Sektoral
	38	Pengendalian Hama Penyakit Tanaman
	39	Peningkatan Perlindungan Usaha Perkebunan
	41	Pemeliharaan Lanjutan Kebun Percontohan Kelapa Sawit dan Kebun Entres
	xx	pembibitan pinang
	xx	pemeliharaan lanjutan kebun induk pinang dan kebun induk kopi
	xx	peremajaan kebun kelapa rakyat
	xx	peremajaan kebun karet rakyat
	xx	Pengembangan komoditi kakao
20		Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
	xx	Penyusunan program penyuluh dan rencana kerja tahunan
	28	Pertemuan Koordinasi Penyuluh Bidang Perkebunan/Peternakan
21		Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
	02	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
	04	Pengawasan perdagangan ternak antar daerah
	07	Pembelian dan Pendistribusian Obat-obatan Ternak, Vaksin dan Peralatan Medis
	xx	Pendataan Penyakit Ternak
	xx	Penyemprotan Desinfektan
	xx	Sosialisasi penyakit zoonosis
22		Program peningkatan produksi hasil peternakan
	xx	pemeliharaan ternak sapi bakalan
	08	Pengembangan agribisnis perternakan
	13	Pengembangan Inseminasi Buatan
	15	Sinkronisasi Birahi
	22	Penyangga Hari Besar Keagamaan
	28	Pusat Pengembangan Itik Daerah
	xx	Pengembangan ternak ruminansia
	xx	Budidaya unggas lokal
	xx	Pengelolaan pakan ternak berbasis sumber daya lokal
	xx	Integrasi ternak dan tanaman

24		Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
	11	Pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG)
	12	Integrasi Ternak Besar dan Kelapa Sawit
	xx	Pengolahan hasil produk peternakan
25		Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan
	01	Pembinaan Kelembagaan dan Kemitraan Usaha Perkebunan
	02	Pelatihan Pemberdayaan Petani Sistem Kebersamaan Ekonomi (SKE)
	03	Pembinaan dan inventarisasi kebun sawit swadaya
	04	Pembinaan Usaha perkebunan berkelanjutan
	03	Penilaian Usaha Perkebunan
29		Program Pengembangan Data/Informasi Perkebunan
	01	Pengolahan Data Statistik Perkebunan
	02	Penyebaran Informasi Pasar Perkebunan
	03	Sinkronisasi Program Perencanaan & Perkebunan Peternakan dan Pelaporan
30		Program Pengembangan Data/Informasi Peternakan
	xx	Pengolahan Data Statistik Peternakan
	01	Pengelolaan Ternak Pemerintah
	02	Penyusunan Laporan Informasi Pasar Peternakan

Selanjutnya, pelaksanaan kebijakan yg dijabarkan menurut Program dengan disertai Pendanaan Indikatif ditampilkan dalam tabel dibawah ini :

Selanjutnya penjelasan lebih rinci **Pendanaan Indikatif Kegiatan** untuk ke 15 Program diatas dijabarkan pada **Lampiran I Tabel. Matriks Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.**

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Penetapan **Indikator Kinerja** Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian *Visi dan Misi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk periode 2016-2021* sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian *tujuan* dan *sasaran RPJMD*.

Indikator Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk periode 2016 - 2021 dapat dilihat pada Tabel 6.1. dibawah ini, yaitu :

Tabel 6.1
Indikator Kinerja SKPD Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada periode RPJMD		Target Capaian Setiap tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
BIDANG PETERNAKAN										
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN										
1. Jumlah Populasi Ternak										
	Populasi Sapi	7.193	Ekor	7.336	7.482	7.631	7.783	7.938	8.096	7.336
	Populasi Kerbau	607	Ekor	613	619	625	632	639	646	613
	Populasi Kambing	40.195	Ekor	40.235	40.275	40.315	40.355	40.395	40.435	40.235
	Populasi Domba	634	Ekor	640	646	652	658	664	670	640
	Populasi Unggas	913.464	Ekor	1.046.758	1.099.095	1.054.050	1.211.753	1.272.340	1.335.957	1.046.758
2. Jumlah Produksi Daging										
	Jumlah Produksi Daging sapi	336.156	Kg	342.879	349.737	356.732	363.867	371.144	378.567	378.567
	Jumlah Produksi Daging Kerbau	12.345	Kg	12.952	12.844	13.101	13.363	13.630	13.903	13.903
	Jumlah Produksi Daging Kambing	53.695	Kg	54.769	55.864	56.981	58.121	59.283	60.469	60.469
	Jumlah Produksi Daging Domba	540	Kg	551	562	573	584	596	608	608
	Jumlah Produksi daging unggas	2.219.127	Kg	2.286.241	2.331.966	2.378.600	2.426.179	2.475.444	2.524.952	2.524.952
	Jumlah kelahiran ternak sapi IB	1.041	Ekor	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.500

Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2016-2021

BIDANG PERKEBUNAN									
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PERKEBUNAN									
1. Jumlah Produksi Perkebunan									
Jumlah Produksi Sawit		Ton	133.858	136.535	139.267	142.051	144.893	147.790	147.790
Jumlah Produksi Karet		Ton	14.367	14.655	14.948	15.247	15.552	15.863	15.863
Jumlah Produksi Kelapa		Ton	55.824	56.941	58.080	59.241	60.426	61.635	61.635
Jumlah Produksi Kopi		Ton	1.238	1.263	1.288	1.314	1.340	1.367	1.367
Jumlah Produksi pinang		Ton	11.208	11.432	11.662	11.895	12.133	12.375	12.375
2. Luas Lahan Tanaman Produksi									
Bertambahnya Luas Lahan Perkebunan :									
Luas Lahan Sawit		Ha	62.889	63.833	64.790	65.762	66.749	67.750	67.750
Luas Lahan Karet		Ha	14.806	15.006	15.206	15.406	15.606	15.806	15.806
Luas Lahan Kelapa		Ha	54.908	55.183	55.458	55.736	56.014	56.294	56.294
Luas Lahan Kopi		Ha	3.073	3.119	3.166	3.213	3.262	3.310	3.310
Luas Lahan pinang		Ha	10.030	10.484	10.798	11.122	11.456	11.800	11.800

BAB VII PENUTUP

Rencana strategis Dinas yang memuat *Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan* merupakan acuan bagi pelaksanaan program pembangunan Perkebunan dan Peternakan. Untuk itu perlu disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat pelaku pembangunan di sektor Perkebunan dan Peternakan. Dengan dijalkannya Renstra ini secara konsisten, diharapkan akan tercipta kesatuan gerak dari *stakeholders* pembangunan perkebunan dan peternakan. Komunikasi yang intensif yang didasari semangat kekeluargaan dan profesionalisme harus terus dikembangkan agar hasil pembangunan perkebunan dan peternakan dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Melalui Musrenbangdes, Musrenbangcam, Forum SKPD, *Stakeholders* menyampaikan masukan tentang prioritas pembangunan yang dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan. Rancangan RENJA tersebut kemudian dibahas dalam Musrenbang Kabupaten. Rancangan Renja tersebut kemudian dibahas dalam Musrenbangkab untuk menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam menyusun Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Pimpinan Satuan Kerja harus mempedomi Renstra Dinas dan hasil Musrenbangkab/RKPD final. Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan menjadi dasar evaluasi dan penyusunan Laporan Pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, serta catatan dan harapan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Sebagai Dokumen Perencanaan Jangka Menengah, Renstra ini harus dijadikan Pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan Dinas serta rencana-rencana Kerja Bidang dan unit Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanung Jabung Barat.

Pada akhirnya segala sesuatunya harus dilakukan dengan tindakan, karena Rencana Strategis saja tidak cukup. Marilah kita bertindak dengan mengarahkan segenap daya dan upaya untuk melaksanakan kegiatan kita sesuai dengan Rencana Strategis yang telah disusun ini. Dukungan dan partisipasi aktif seluruh pejabat dan staf serta masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat kita perlukan, agar tindakan yang kita laksanakan berjalan lebih lancar.

Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita sekalian.

**MATRIKS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB.TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2016-2021**

Urusan Pilihan

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Program/Kegiatan	Kondisi Capaian Awal RPKMD	Satuan	Target						Alokasi Anggaran (Rp.)						Total Alokasi Anggaran (Rp.)	Pelaksana Eselon III
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6						7						8	9
01	meningkatnya intensitas dan kualitas pelayanan administrasi	Program pelayanan Administrasi Perkantoran						421,725,400	584,136,000	577,645,800	602,283,650	628,139,582	655,274,408	3,469,204,840	Sekretariat			
01	tersedianya jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	100	%	100	100	100	100	100	100	3,445,000	5,400,000	5,778,000	6,182,460	6,615,232	7,078,298	34,498,991	
02	tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	bulan	12	12	12	12	12	12	38,000,000	142,800,000	36,500,000	37,595,000	38,722,850	39,884,536	333,502,386	
07	tersedianya honorarium jasa adm keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	1	paket	1	1	1	1	1	1	52,500,000	100,700,000	110,770,000	116,308,500	122,123,925	128,230,121	630,632,546	
08	tersedianya jasa kebersihan kantor	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12	bulan	12	12	12	12	12	12	1,280,400	19,737,000	20,723,850	21,760,043	22,848,045	23,990,447	110,339,784	
10	tersedianya atk kantor	Penyediaan alat tulis kantor	12	bulan	12	12	12	12	12	12	65,000,000	76,147,000	79,954,350	83,952,068	88,149,671	92,557,154	485,760,243	
11	tersedianya baran cetak dan pengadaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	bulan	12	12	12	12	12	12	15,000,000	17,250,000	18,112,500	19,018,125	19,969,031	20,967,483	110,317,139	
13	tersedianya komponen intalasi listrik	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	12	bulan	12	12	12	12	12	12	1,000,000	16,662,000	17,495,100	18,369,855	19,288,348	20,252,765	93,068,068	
15	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1	paket	1	1	1	1	1	1	2,500,000	6,000,000	6,300,000	6,615,000	6,945,750	7,293,038	35,653,788	
17	tersedianya makan minum	Penyediaan makanan dan minuman	12	bulan	12	12	12	12	12	12	3,000,000	19,440,000	20,412,000	21,432,600	22,504,230	23,629,442	110,418,272	
18	terpenuhnya rapat koordinasi dan konsultasi	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	bulan	12	12	12	12	12	12	175,000,000	180,000,000	189,000,000	198,450,000	208,372,500	218,791,125	1,169,613,625	
19	tersedianya honorarium jasa adm teknis perkantoran	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	12	bulan	12	12	12	12	12	12	65,000,000	-	72,600,000	72,600,000	72,600,000	72,600,000	355,400,000	
02	meningkatnya kelengkapan dan kualitas pelayanan administrasi	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						157,000,000	475,250,000	487,350,000	573,767,500	480,918,375	426,214,294	2,600,500,169	Sekretariat /Sarana prasarana			
11	terlaksananya pengadaan kendaraan operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	20	unit			1	1	1	1			18,000,000	18,900,000	19,845,000	20,837,250	77,582,250	
12	terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor									-	-	105,000,000	110,250,000	115,762,500	121,550,625	452,563,125	
		- AC	17	unit			1	1	1				5,000,000	5,500,000	6,050,000			
		- Genset	-	unit			1						100,000,000					
13	terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor									20,000,000	-	37,000,000	139,500,000	30,250,000	33,275,000	260,025,000	
		- laptop	7	unit	2		2	2	2		20,000,000		20,000,000	22,000,000	24,200,000	26,620,000		
		- printer	12	unit			2	2	2				5,000,000	5,500,000	6,050,000	6,655,000		
		- filing cabinet	9	unit			4	4					12,000,000	12,000,000				
		- Meubeleir UPT Dinas		paket				2					100,000,000					
22	terpeliharanya kendaraan operasional	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	26	Unit	26	27	29	31	31	31	132,000,000	403,500,000	170,350,000	178,867,500	187,810,875	197,201,419	1,269,729,794	
		- mobil	3	unit	3	3	3	3	3	3	58,350,000		90,000,000	94,500,000	99,225,000	104,186,250		
		- Roda 2	21	unit	21	21	23	25	25	25	63,650,000		70,350,000	73,867,500	77,560,875	81,438,919		
		- Asuransi Mobil	2	unit	2	3	3	3	3	3	10,000,000		10,000,000	10,500,000	11,025,000	11,576,250		
26	terpeliharanya peralatan gedung kantor	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	100	%	100	100	100	100	100	100		71,750,000	25,000,000	101,250,000	101,250,000	26,250,000	325,500,000	
		- Pembuatan Sumur Bor+Perlengkapan	1	unit				1	1			45,000,000		75,000,000	75,000,000			
		- Penambahan daya listrik	1	paket			1											
32	terpeliharanya gedung kantor	Pemeliharaan Rutin/ Berkala gedung kantor	100	%	100	100	100	100	100	100	5,000,000	-	132,000,000	25,000,000	26,000,000	27,100,000	215,100,000	
		- Pemeliharaan rutin gedung kantor UPT		unit				3	3	3				15,000,000	15,000,000	15,000,000		
		- Pembangunan Rumah Genset		unit			1						100,000,000					
		- Pembangunan Tower Air		unit			1						25,000,000					
		- Pemeliharaan rutin gedung kantor Dinas		paket			1	1	1	1	5,000,000		7,000,000	10,000,000	11,000,000	12,100,000		

Kode Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Program/Kegiatan	Kondisi Capaian Awal RPJMD	Satuan	Target					Alokasi Anggaran (Rp.)					Total Alokasi Anggaran (Rp.)	Pelaksana Eselon III		
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019			2020	2021
1	2	3	4	5	6					7					8	9		
34	tersedianya bibit kelapa sawit yg bermutu	Pembibitan Kelapa Sawit		kecambah	10,000	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000	337,000,000	335,000,000	341,700,000	348,534,000	355,504,680	362,614,774	2,080,353,454	
35	terlaksananya pencegahan dan pengendalian karhutla dan konflik lahan	Pencegahan, Pengendalian Kebakaran Lahan, Kebun dan Konflik Lahan Perkebunan	13	kecamatan	13	13	13	13	13	13		152,591,000	155,642,820	158,755,676	161,930,790	165,169,406	794,089,692	
36	terlaksananya pembinaan, pengawasan pupuk dan pestisida	Peningkatan, Pembinaan, Pengawasan Pupuk dan Pestisida	13	kecamatan	13	13	13	13	13	13		40,325,000	41,131,500	41,954,130	42,793,213	43,649,077	209,852,919	
37	pengadaan bantuan lintas sektoral	Pembinaan Lintas Sektoral	2	Desa		2	2	2	2	2		88,980,000	90,759,600	92,574,792	94,426,288	96,314,814	463,055,493	
38	teratasinya serangan OPT kebun rakyat	- Pelatihan Dinamika Kelompok - Pengadaan bibit unggul tanaman - Pengadaan pupuk dan obatan tanaman Pengendalian Hama Penyakit Tanaman	100	Org Paket Ha		50 1	50 1	50 1	50 1	50 1			119,595,000	121,986,900	124,426,638	126,915,171	129,453,474	622,377,183
39	terlaksananya pengendalian hama penyakit tanaman perkebunan	Peningkatan Perlindungan Usaha Perkebunan	30	Ha	30	30	30	30	30	30	180,000,000	87,310,000	89,929,300	92,627,179	95,405,994	98,268,174	643,540,648	
41	terpeliharanya kebun percontohan kelapa sawit dan kebun entres	Pemeliharaan Lanjutan Kebun Percontohan Kelapa Sawit dan Kebun Entres		Ha	9	9	9	9	9	9	130,000,000	125,000,000	131,250,000	137,812,500	144,703,125	151,938,281	820,703,906	
xx	tersedianya bibit pinang yg bermutu	pembibitan pinang		kecambah			10,000	10,000	10,000	10,000			50,000,000	52,500,000	55,125,000	57,881,250	215,506,250	
xx	terpeliharanya kebun induk pinang dan kopi	pemeliharaan lanjutan kebun induk pinang dan kebun induk kopi		Ha			5	5	5	5			75,000,000	78,750,000	82,687,500	86,821,875	323,259,375	
xx	luas lahan peremajaan kelapa	peremajaan kebun kelapa rakyat		Ha			50	50	50	50			300,000,000	315,000,000	330,750,000	347,287,500	1,293,037,500	
xx	luas lahan peremajaan karet	peremajaan kebun karet rakyat		Ha			50	50	50	50			150,000,000	157,500,000	165,375,000	173,643,750	646,518,750	
xx	luas lahan pengembangan kakao	Pengembangan komoditi kakao		Ha			20	20	20	20			150,000,000	157,500,000	165,375,000	173,643,750	646,518,750	

Kode Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Program/Kegiatan	Kondisi Capaian Awal RPJMD	Satuan	Target					Alokasi Anggaran (Rp.)					Total Alokasi Anggaran (Rp.)	Pelaksana Eselon III		
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019			2020	2021
1	2	3	4	5	6					7					8	9		
20	meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap penyuluh	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan		Dok		2	2	2	2	2		154,310,000	308,939,300	318,207,479	327,753,703	337,586,314	1,446,796,797	Bidang Penyuluh
xx	tersedianya program dan rencana kerja tahunan penyuluh	Penyusunan program penyuluh dan rencana kerja tahunan		Dok		2	2	2	2	2			150,000,000	154,500,000	159,135,000	163,909,050	627,544,050	
28	terlaksananya koordinasi penyuluh perkebunan/peternakan	Pertemuan Koordinasi Penyuluh Bidang Perkebunan/Peternakan		kali		12	12	12	12	12		154,310,000	158,939,300	163,707,479	168,618,703	173,677,264	819,252,747	
21	menurunkan angka kematian ternak	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak									529,950,000	562,149,000	818,896,470	852,587,004	887,744,435	924,435,580	4,575,762,489	Bidang Peternakan
02	jumlah ternak yg terlayani pengobatan, PKB, pemeriksaan spesimen, vaksinasi, eliminasi	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak									221,100,000	265,800,000	273,774,000	281,987,220	290,446,837	299,160,242	1,632,268,298	
04	terlaksananya pengawasan perdagangan ternak dan pemotongan	Pengawasan perdagangan ternak antar daerah	12	bulan	12	12	12	12	12	12	94,850,000	86,350,000	88,940,500	91,608,715	94,356,976	97,187,686	553,293,877	
07	tersedianya obat-obatan ternak dan peralatan medis veteriner	Pembelian dan Pendistribusian Obat-obatan Ternak, Vaksin dan Peralatan Medis		paket	1	2	2	2	2	2	214,000,000	209,999,000	216,298,970	227,113,919	238,469,614	250,393,095	1,356,274,598	
xx	terlaksananya pendataan penyakit ternak	Pendataan Penyakit Ternak		dok			1	1	1	1			83,983,000	88,182,150	92,591,258	97,220,820	361,977,228	
xx	terlaksananya penyemprotan desinfektan	Penyemprotan Desinfektan		liter			150	150	150	150		115,900,000	121,695,000	127,779,750	134,168,738	134,168,738	499,543,488	
xx	terlaksananya sosialisasi penyakit zoonosis	Sosialisasi penyakit zoonosis		kali			4	4	4	4			40,000,000	42,000,000	44,100,000	46,305,000	172,405,000	
22	meningkatkan populasi dan produksi hewan ternak sapi, kerbau, kambing, domba, babi, ayam broiler, ayam buras, itik	Program peningkatan produksi hasil peternakan									477,100,000	832,270,000	4,353,291,200	4,605,755,760	4,868,262,548	5,141,311,245	20,277,990,753	Bidang Peternakan
08	terpeliharanya sapi bakalan terlaksananya pelatihan arabisnis peternakan	pemeliharaan ternak sapi bakalan Pengembangan agribisnis peternakan		ekor kali		1	1	1	1	1		75,870,000	914,165,000	959,873,250	1,007,866,913	1,058,260,258	3,940,165,421	
13	jumlah sapi IB	Pengembangan Inseminasi Buatan		ekor	1500	1500	1100	1200	1300	1400	216,250,000	230,800,000	242,340,000	254,457,000	267,179,850	280,538,843	1,491,565,693	
15	jumlah sapi IB	Sinkronisasi Birahi		ekor	1000	1000	1000	1000	1000	1000	137,800,000	245,100,000	295,050,000	309,802,500	325,292,625	341,557,256	1,654,602,381	
22	tersedianya daging untuk konsumsi hari besar keagamaan	Penyandang Hari Besar Keagamaan		kg	600	600	1000	1000	1000	1000	123,050,000	137,100,000	313,000,000	328,650,000	345,082,500	362,336,625	1,609,219,125	
28	pengadaan bibit itik indukan	Pusat Pengembangan Itik Daerah		ekor		300	1000	1000	1000	1000		143,400,000	350,000,000	367,500,000	385,875,000	405,168,750	1,651,943,750	
xx	terlaksananya pengembangan ternak ruminansia	Pengembangan ternak ruminansia		ekor			50	50	50	50		1,456,646,800	1,529,479,140	1,605,953,097	1,686,250,752	6,278,329,789		
xx	terlaksananya budidaya unggas lokal	Budidaya unggas lokal		KT			1	1	1	1			315,719,400	331,505,370	348,080,639	365,484,670	1,360,790,079	
xx	jumlah KT yg menerapkan pengelolaan pakan berbasis sumber daya lokal	Pengelolaan pakan ternak berbasis sumber daya lokal		KT			2	2	2	2		135,000,000	139,050,000	143,221,500	147,518,145	564,789,645		
xx	jumlah KT yg melaksanakan integrasi ternak dan tanaman	Integrasi ternak dan tanaman		KT			1	1	1	1			250,000,000	300,000,000	350,000,000	400,000,000	1,300,000,000	

Kode Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Program/Kegiatan	Kondisi Capaian Awal RFJMD	Satuan	Target						Alokasi Anggaran (Rp.)						Total Alokasi Anggaran (Rp.)	Pelaksana Eselon III
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6						7						8	9
24	jumlah kelompok peternak yg menerapkan teknologi peternakan	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan									120,264,600	67,409,000	410,000,000	430,500,000	452,025,000	474,626,250	1,954,824,850	Bidang Peternakan
11	terlaksananya pelatihan TTG	Pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG)		kali	4	2	4	4	4	4	120,264,600	67,409,000	170,000,000	178,500,000	187,425,000	196,796,250	920,394,850	
12	jumlah kelompok tani yg mengembangkan integrasi kebun dan ternak	Integrasi Ternak Besar dan Kelapa Sawit		KT			3	3	3	3			90,000,000	94,500,000	99,225,000	104,186,250	387,911,250	
xx	tersedianya kandang ideal untuk ternak	Pengolahan hasil produk peternakan		KT			2	2	2	2			150,000,000	157,500,000	165,375,000	173,643,750	646,518,750	
25	meningkatnya kepatuhan dan kerjasama kemitraan antara perusahaan dengan asosiasi petani pada 5 komoditi unggulan	Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan									186,930,000	313,389,550	586,933,278	447,641,276	458,670,514	470,030,630	2,463,595,247	Bidang Peternakan
01	terbinanya asosiasi dan terjalinnnya kerjasama kemitraan	Pembinaan Kelembagaan dan Kemitraan Usaha Perkebunan		aso			5	5	5	5		60,000,000	70,000,000	72,100,000	74,263,000	76,490,890	352,853,890	
02	terlaksananya pelatihan SKE	Pelatihan Pemberdayaan Petani Sistem Kebersamaan Ekonomi (SKE)		Org	125	125	125	125	125	125		95,174,550	99,933,278	102,931,276	106,019,214	109,199,791	513,258,108	
03	diperolehnya STD-B untuk kebun sawit swadaya	Pembinaan dan inventarisasi kebun sawit swadaya		ha	1000	700	1000	1000	1000	1000	186,930,000	158,215,000	187,000,000	192,610,000	198,388,300	204,339,949	1,127,483,249	
04	terbinanya perusahaan sebanyak 21 perusahaan	Pembinaan Usaha perkebunan berkelanjutan		persil			19	19	19	19			80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	320,000,000	
03	tersedianya kelas usaha perkebunan	Penilaian Usaha Perkebunan		persil			19						150,000,000				150,000,000	
29	tersedianya data perkebunan yg valid dan up to date	Program Pengembangan Data/Informasi Perkebunan									393,526,000	341,770,000	450,000,000	463,500,000	477,405,000	491,727,150	2,617,928,150	Sekretariat /Bid.Penyuluhan
01	tersedianya data statistik perkebunan	Pengolahan Data Statistik Perkebunan		buku	20	20	20	20	20	20	148,986,000	146,630,000	150,000,000	154,500,000	159,135,000	163,909,050	923,160,050	
02	tersediannya dokumen informasi pasar	Penyebaran Informasi Perkebunan		dok	1	1	1	1	1	1	119,540,000	90,625,000	170,000,000	175,100,000	180,353,000	185,763,590	921,381,590	
03	tersedianya RENJA,RKA,DPA,TAPKIN dan LAKIP	Sinkronisasi Program Perencanaan Perkebunan Peternakan dan Pelaporan		dok	4	4	4	4	4	4	125,000,000	104,515,000	130,000,000	133,900,000	137,917,000	142,054,510	773,386,510	
30	tersedianya data peternakan yg valid dan up to date	Program Pengembangan Data/Informasi Peternakan									-	432,375,000	445,912,250	459,289,618	473,068,306	487,260,355	2,297,905,529	Sekretariat /Bid.Penyuluhan
xx	tersedianya data statistik peternakan	Pengolahan Data Statistik Peternakan		buku	20	20	20	20	20	20		140,000,000	147,000,000	151,410,000	155,952,300	160,630,869	754,993,169	
01	terkelolanya pusat ternak daerah	Pengelolaan Ternak Pemerintah		dok	1	1	1	1	1	1		147,800,000	150,000,000	154,500,000	159,135,000	163,909,050	775,344,050	
02	tersediannya dokumen informasi pasar	Penyusunan Laporan Informasi Pasar Peternakan		dok	1	1	1	1	1	1		144,575,000	148,912,250	153,379,618	157,981,006	162,720,436	767,568,310	
Total											3,917,496,000	5,689,121,550	23,039,355,268	24,282,601,519	25,478,668,195	26,231,813,502	107,192,259,236	